Cecep Suryana dkk.

Rekonstruksi Partai Politik

Dalam Sistem Politik Indonesia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Rekonstruksi Partai Politik dalam Sistem Politik Indonesia

Penulis:
H. Cecep Suryana
Mochamad Adlan Fauzan
Muhammad Husna Hisaba
Muhammad Zarkasih
Muthi Amrullah Harahap
Nur Islakhul Khasanah
Nurliana Amelia

ISBN: 978-623-88160-3-3 (PDF)

Editor:
Asep Iwan Setiawan

Penyunting:
Khoiruddin Muchtar

Desain Sampul dan Tata Letak:
Ridwan Rustandi
Rahmat Ridwan

Penerbit:
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Redaksi:
Gedung Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jl. AH. Nasution No. 105 Cipadung Cibiru Bandung
Telepon : 022-7810788
Fax : 0227810788
E-mail :fdk@uinsgd.ac.id
Website : https://fdk.uinsgd.ac.id/

Cetakan pertama, Juli 2022

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongannya tentunya kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan buku ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW.

Kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT. atas limpahan nikmat sehatnya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga kami mampu untuk menyelesaikan pembuatan buku sebagai salah satu tugas mata kuliah Sistem Politik Indonesia dengan judul "Rekonstruksi Partai Politik dalam Sistem Politik Indonesia".

Kami tentu menyadari bahwa penulisan buku ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, kami mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk buku ini, agar nantinya dapat menjadi buku yang lebih baik lagi. Kemudian apabila terdapat banyak kesalahan pada penulisan buku ini kami mohon maaf.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Bandung, 13 Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

SINOPSIS

Sengkarut masalah perpolitikan layaknya benang kusut yang sulit terurai, bukan hanya di negara Indonesia, melainkan juga di berbagai negara lainnya di dunia. Mengingat belum adanya rumusan politik maupun suatu sistem politik yang tepat untuk sebuah masyarakat yang dinamis dan beragam, ditambah banyaknya perspektif dan kacamatan politik sehingga membuatnya tidak lepas dari perbedaan dan konflik.

Perbedaan yang ada membuat setiap negara memiliki sistem politiknya masing-masing, termasuk Negara Indonesia itu sendiri. Kehadrian sistem politik dalam suatu entitas negara sangat krusial bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan yang telah dicita-citakan.

Sistem politik yang ideal haruslah memiliki dampak yang luas bagi kebaikan dan kesejahteraan masyarakatnya, suatu sistem politik yang sehati ditandai dengan kualitas hidup masyarakatnya yang sehat pula baik dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, HAM, dan lain sebagainya.

Buku ini akan berusaha mengulas dan memecah permasalahan sistem politik di Indonesia yang menitikberatkan pada peran partai politik didalamnya, mengingat dewasa ini terjadi regresi sistem politik yang amat mengkhawatirkan berdasarkan pada perkembangan sistem politik di Indonesia belum mencapai titik ideal dari waktu ke watu, bahkan jauh dari cita-cita dan harapan bangsa, sehingga perlu dibahas mengenai rekonstruksi dalam perkara ini untuk mengembalikan kesadaran masyarakat dan semua pihak dalam membangun entitas negara yang sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan.

BAB I SEJARAH DAN PENGERTIAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Partai politik di Indonesia adalah organisasi yang bersifat nasional dan diproduksi oleh sekelompok berwarga-negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela keperluan politik anggota, warga, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Untuk mengikuti Pemilihan Umum, partai politik wajib memenuhi persyaratan tertentu yang telah diputuskan oleh Undang-Undang. Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum akan melakukan bagian verifikasi. Bagian verifikasi terdiri atas dua tahap: verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

A. Sejarah Ketika Penjajahan Belanda

Ketika ini dikata untuk periode pertama lahirnya partai politik di Indoneisa (waktu itu Hindia Belanda). Lahirnya partai menandai keadaan kesadaran nasional. Pada ketika itu semua organisasi adun yang berhaluan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, ataupun yang berazaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI dan Partai Katolik, ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka.

Kehadiran partai politik pada ketika awal merupakan menifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Setelah didirikan Dewan Rakyat, gerakan ini oleh beberapa partai diteruskan di dalam badan ini. Pada tahun 1939 benar beberapa fraksi di dalam Dewan Rakat, yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan M. Husni Thamin, PPBB (Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi Putera) di bawah pimpinan Prawoto dan Indonesische Nationale Groep di bawah pimpinan Muhammad Yamin.

Di luar dewan rakyat benar usaha untuk mengadakan gabungan partai politik dan menjadikannya semacam dewan perwakilan rakyat. Pada tahun 1939 diproduksi KRI (Komite Rakyat Indoneisa) yang terdiri atas GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang merupakan gabungan dari partai-partai yang beraliran nasional, MIAI (Majelis Islamilllaa Indonesia) yang merupakan gabungan partai-partai yang beraliran Islam yang terbentuk tahun 1937, dan MRI (Majelis Rakyat Indonesia) yang merupakan gabungan organisasi buruh.

Pada tahun 1939 di Hindia Belanda telah benar beberapa fraksi dalam volksraad yaitu Fraksi Nasional, Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi-Putera, dan Indonesische Nationale Groep. Sedangkan di luar volksraad benar usaha untuk mengadakan gabungan dari Partai-Partai Politik dan menjadikannya semacam dewan perwakilan nasional yang dikata Komite Rakyat Indonesia (K.R.I). Di dalam K.R.I benar Gabungan Politik Indonesia (GAPI), Majelisul Islami A'laa Indonesia (MIAI) dan Majelis Rakyat Indonesia (MRI). Fraksi-fraksi tersebut di atas adalah merupakan partai politik-partai politik yang pertama kali terbentuk di Indonesia.

B. Ketika Penjajahan Jepang

Pada ketika ini, semua keaktifan partai politik dilarang, hanya kelompok Islam diberi kebebasan untuk membentuk partai Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Partai Masyumi), yang lebih banyak bangkit di aspek sosial.

C. Ketika Pasca Proklamasi Kemerdekaan

Beberapa bulan setelah proklamsi kemerdekaan, membuka kesempatan yang akbar untuk membangun partai politik, sehingga bermunculanlah parti-partai politik Indonesia. Dengan demikian kita kembali kepada pola sistem banyak partai.

Pemilu 1955 memunculkan 4 partai politik akbar, yaitu : Masyumi, PNI, NU dan PKI. Ketika tahun 1950 mencapai 1959 ini sering dikata untuk ketika kejayaan partai politik, sebab partai politik memainkan peranan yang sangat

penting dalam kehidupan bernegara menempuh sistem parlementer. Sistem banyak partai ternyata tidak dapat berlangsung adun. Partai politik tidak dapat menerapkan fungsinya dengan adun, sehingga kabinet jatuh bangkit dan tidak dapat menerapkan program kerjanya. Untuk hasilnya pembangunan tidak dapat berjaan dengan adun pula.

Ketika demokrasi parlementer diakhiri dengan Dekrit 5 Juli 1959, yang mewakili ketika masa demokrasi terpimpin. Pada ketika demokrasi terpimpin ini peranan partai politik mulai dikurangi, sedangkan di pihak lain, peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada ketika ini diketahui dengan NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) yang diwakili oleh NU, PNI dan PKI. Pada ketika Demokrasi Terpimpin ini nampak sekali bahwa PKI memainkan peranan lebih kuat, terutama menempuh G 30 S/PKI penghabisan September 1965).

Setelah itu Indonesia memasuki ketika Orde Baru dan partai-partai dapat bangkit lebih leluasa dibanding dengan msa Demokrasi terpimpin. Suatu catatan pada ketika ini adalah munculnya organisasi daya politik bar yaitu Kelompok Karya (Golkar). Pada pemilihan umum thun 1971, Golkar muncul untuk pemenang partai disertai oleh 3 partai politik akbar yaitu NU, Parmusi (Persatuan Muslim Indonesia) serta PNI.

Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai menempuh fusi partai politik. Empat partai politik Islam, yaitu : NU, Parmusi, Partai Sarikat Islam dan Perti bergabung menjadi Partai Persatu Pembangunan (PPP). Lima partai lain yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Parati Katolik, Partai Murba dan Partai IPKI (ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Maka pada tahun 1977 hanya tiga organisasi kekuatan politik Indonesia dan terus berlanjut hinga pada pemilu 1997.

Setelah gelombang reformasi terjadi di Indonesia yang ditandai dengan tumbangnya rezim Suharto, maka pemilu dengan sistem multi partai kembali

terjadi di Indonesia. Setelah merdeka, Indonesia menganut sistem Multi Partai sehingga terbentuk berlebihan Partai Politik. Memasuki ketika Orde Baru (1965-1998), Partai Politik di Indonesia hanya berjumlah 3 partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Kelompok Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Di ketika Reformasi, Indonesia kembali menganut sistem multi partai.

BAB II SEJARAH DAN PENGERTIAN SISTEM POLITIK INDONESIA

A. Pengertian Sistem Politik

Sebelum masuk ke pembahasan pengertian sistem politik, mari kita pahami terlebih dahulu definisi dari kata “sistem” dan “politik”. Kata sistem berasal dari bahasa latin *systema* yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan. Menurut Sutabri, sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. Sedangkan menurut Pamudji, sistem merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan yang komplek atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang komplek atau utuh.

Adapun kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu “*polis*” yang berarti kota atau negara kota, dengan kata lain politik berarti adanya hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan dan pada akhirnya kekuasaan. Politik dalam bahasa arab disebut “*siyasyah*” yang kemudian diterjemahkan menjadi siasat, yang artinya dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara.

Turunan dari kata polis tersebut meliputi:

1. *Polites* berarti warga negara.
2. *Politikos* berarti kewarganegaraan.
3. *Politike tehne* berarti kemahiran politik.
4. *Politike episteme* berarti ilmu politik.

Secara etimologi kata "politik" masih berhubungan dengan politis, kebijakan. Kata "politis" berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata "politisi" berarti orang-orang yang menekuni hal politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun

nonkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

1. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (Teori Klasik Aristoteles).
2. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara.
3. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.
4. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Lalu apa sebenarnya definisi sistem politik, secara umum sistem politik adalah kumpulan pendapat dan lain-lain yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur hubungan antara individu satu sama lainnya atau dengan negara dan hubungan negara dengan negara lain.

Sistem politik bisa juga diartikan sebagai suatu sistem atau perangkat yang saling bekerja sama untuk membentuk suatu pemerintahan/politik yang bersahaja. Yaitu suatu sistem dalam menerapkan aturan dalam hubungan sosial manusia yang meliputi kewenangan kekuasaan hukum dan kewajiban.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian sistem politik yaitu mekanisme seperangkat fungsi atau peranan struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukan suatu proses yang langsung memandang dimensi waktu (melampaui masa kini dan masa yang akan datang).

Sedangkan pengertian sistem politik menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Samuel P. Huntington

   Pengertian sistem politik menurut Samuel P. Huntington bahwa sistem politik terbagi atas lima definisi sesuai dengan komponen yang dimilikinya yaitu:

   a. Sistem politik sebagai Budaya (kultur), yaitu nilai-nilai (*values*), sikap sikap (*attitudes*), orientasi (*orientation*), mitos (*myths*) dan kepercayaan (*beliefs*) yang relevan terhadap poltik dan yang berpengaruh dalam masyarakat.
   b. Sistem politik sebagai struktur, yaitu organisasi formal dalam masyarakat di mana digunakan untuk menjalankan keputusan keputusan yang berwenang seperti misalnya partai politik, badan perwakilan rakyat, eksekutif dan birokrasi.
   c. Sistem politik sebagai kelompok (*The political system as a group*) yaitu bentuk bentuk sosial dan ekonomi baik yang formal ataupun nonformal, yang berpartisipasi dalam politik yang mengajukan tuntutan tuntutan terhadap struktur struktur politik.
   d. Sistem politik sebagai kepemimpinan (*The political system as leadership*) bahwa individu dalam lembaga lembaga politik dan kelompok kelompok politik yang menjalankan pengaruh lebih daripada lainnya dalam memberikan alokasi nilai nilai.
   e. Sistem politik sebagai kebijakan bahwa pola pola kegiatan pemerintahan yang secara sadar terbentuk untuk mempengaruhi distribusi keuntungan dalam masyarakat.

2. Menurut Robert Dahl

   Pengertian sistem politik menurut Robert Dahl bahwa sistem politik adalah suatu pola yang tetap dari hubungan manusia yang melibatkan makna yang luas dari kekuasaan, aturan aturan dan kewenangan.

3. Menurut Sri Soemantri

   Pengertian sistem politik berdasarkan Sri Soemantri bahwa sistem politik adalah pelembagaan dari hubungan antara manusia yang dilembagakan dalam bermacam macam badan politik, baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik adalah lembaga lembaga negara yang bersangkutan, yang pada umumnya berupa lembaga legislatif dengan kekuasaan legislatif (*the legislature with legislative power*), lembaga eksekutif dengan kekuasaan eksekutif (*the executive with the executive power*) serta lembaga yudisiil dengan kekuasaan yudikatif (*judiciary with judicial powers*). Infrastruktur politik adalah suatu negara pada umumnya memiliki 5 komponen yaitu partai politik, kelompok, kepentingan (*interest group*), kelompok penekan (*pressure group*), alat komunikasi politik (*media of political communication*), dan tokoh politik (*political figure*).

4. Menurut David Easton

   Pengertian sistem politik menurut David Easton bahwa sistem politik adalah sebuah sistem yang terdiri dari alokasi nilai nilai dan pengalokasian nilai nilai yang ada bersifat paksaan serta mengikat masyarakat secara keseluruhan. Davin Easton menambahkan bahwa sistem politik dapat dikenali sebagai sebuah interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkatan sosial, melalu makna nilai nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.

   Pengertian sistem politik menurut David Easton masih memegang posisi kunci dalam studi politik negara. Pengertian struktural fungsional dari Gabriel Almond mempertajam konsep David Easton tersebut. Sistem adalah kesatuan seperangkat struktur yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai

tujuan tertentu. Sistem politik adalah kesatuan (kolektivitas) seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan suatu negara.

Pendekatan sistem politik ditujukan untuk memberi penjelasan yang bersifat ilmiah terhadap fenomena politik. Pendekatan sistem politik dimaksudkan juga untuk menggantikan pendekatan klasik ilmu politik yang hanya mengandalkan analisis pada negara dan kekuasaan. Pendekatan sistem politik diinspirasikan oleh sistem yang berjalan pada makhluk hidup (dari disiplin biologi).

Dalam pendekatan sistem politik, masyarakat adalah konsep induk oleh sebab sistem politik hanya merupakan salah satu dari struktur yang membangun masyarakat seperti sistem ekonomi, sistem sosial dan budaya, sistem kepercayaan dan lain sebagainya. Sistem politik sendiri merupakan abstraksi (realitas yang diangkat ke alam konsep) seputar pendistribusian nilai di tengah masyarakat.

Seperti telah dijelaskan, masyarakat tidak hanya terdiri atas satu struktur (misalnya sistem politik saja), melainkan terdiri atas multi struktur. Sistem yang biasanya dipelajari kinerjanya adalah sistem politik, sistem ekonomi, sistem agama, sistem sosial, atau sistem budaya-psikologi. Dari aneka jenis sistem yang berbeda tersebut, ada persamaan maupun perbedaan. Perbedaan berlingkup pada dimensi ontologis (hal yang dikaji) sementara persamaan berlingkup pada variabel-variabel (konsep yang diukur) yang biasanya sama antara satu sistem dengan lainnya.

5. Menurut Gambriel Almond

Pengertian sistem politik Menurut Gambriel Almond bahwa sistem politik adalah sebuah sistem interaksi yang dapat ditemukan dalam masyarakat merdeka (*The political system is a system of interaction*

that can be found in a free society), yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Fungsi integrasi yang dijalankan oleh sistem politik untuk mencapai kesatuan dan persatuan dalam masyarakat yang bersangkutan. sedangkan fungsi adaptasi adalah sebuah fungsi penyesuaian terhadap lingkungan.

6. Menurut Rusadi Sumintapura

   Pengertian Sistem politik menurut Rusadi Sumintapura bahwa sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng.

7. Menurut Sukarna

   Pengertian sistem politik menurut Sukarna bahwa sistem politik adalah suatu tata cara untuk mengatur atau mengelola bagaimana memperoleh kekuasaan dalam negara, mempertahankan kedudukan kekuasaan dalam negara, mengatur hubungan pemerintah dengan rakyat atau sebaliknya dan mengatur hubungan negara dengan negara, atau dengan rakyatnya atau dengan cara singkat dapat dikatakan bahwa sistem politik adalah tata cara mengatur negara.

8. Menurut Drs. Sukarno

   Pengertian sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.

9. Menurut Rusadi Kartaprawira

Definisi sistem politik adalah Mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgggeng.

10. Menurut Drh. Wiku Adisasmito

    Sistem politik adalah suatu dugaan abstrak dari kekuatan-kekuatan yang berbenturan antara negara dan pemerintah.

11. Menurut Mohamad Bahrudin Podomi

    Sistem politik adalah rangkaian metode yang bersifat sistematis, terstruktur, dan fleksibel terhadap faktor-faktor internal maupun eksternal.

12. Menurut Drs. Abdul Kadir

    Sistem politik adalah suatu sitem yang legitimate, sistem yang memelihara ketertiban (*order-manitaining*) atau sistem yang mentransformasi (*transforming system*) dalam suatu masyarakat. Sistem politik pada hakikatnya adalah suatu pola interaksi yang tetap, legitimate, yang mengikat dan bersifat otoritatif, yang melibatkan kekuasaan, aturan yang luas dan signifikan.

13. Menurut Fredrick W. Frey

    Sistem politik adalah sistem interaksi dalam suatu masyarakat melalui mana alokasi-alokasi nilai-nilai yang mengikat dan bersifat otoritatif dibuat dan diimplementasikan.

14. Menurut Prof. Sri Sumantri

    Definisi sistem politik adalah kelembagaan dari hubungan antara manusia yang berupa hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur politik.

15. Menurut Prayetno

    Sistem politik adalah sejumlah lembaga atau aktivitas politik dimasyarakat yang berfungsi mengubah input (*demand*, *support* dan

resources) menjadi kebijakan yang otoritatif bagi masyarakat (*out-put*).

B. Pengertian Sistem Politik Indonesia

Ada beberapa pengertian mengenai sistem politik Indonesia, diantaranya:

1. Sistem politik adalah suatu prosedur untuk mengoperasikan bagaimana mendapatkan suatu otoritas di dalam negara, mengoperasikan interaksi pemerintah dan rakyat ataupun sebaliknya, mengoperasikan interaksi negara dengan rakyatnya.
2. Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.
3. Sistem politik Indonesia merupakan sistem politik yang dianut oleh Indonesia yang berdasarkan nilai budaya Indonesia yang bersifat turun-temurun dan juga bisa diadopsi dari nilai budaya asing yang positif bagi pembangunan sistem politik Indonesia.

Layaknya dalam memahami sistem-sistem yang lain, untuk memahami sistem politik Indonesia kita harus mengetahui beberapa variabel kunci. Variabel-variabel kunci tersebut meliputi struktur, fungsi, aktor, nilai, norma, tujuan, input, output, respon, dan umpan balik.

Struktur merupakan lembaga politik yang memiliki keabsahan dalam menjalankan suatu fungsi sistem politik. Dalam konteks negara (sistem politik), struktur meliputi struktur input, proses, serta output. Struktur input berperan sebagai pemasok komoditas ke dalam sistem politik tersebut, struktur proses bertugas mengolah masukan dari struktur input tadi, sementara struktur output bertindak selaku mekanisme pengeluarannya.

Hal ini mirip dengan organisme yang membutuhkan makanan, pencernaan, dan metabolisme untuk tetap bertahan hidup. Struktur input, proses dan output umumnya dijalankan oleh lembaga-lembaga negara yang dikategorikan menjadi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga lembaga ini menjalankan tugasnya masing-masing yang disebut sebagai pemerintah (*government*). Namun, dalam setiap lembaganyang mewakili struktur harus memiliki fungsi yang berbeda-beda. Struktur harus menjalankan fungsinya masing-masing, karena jika menjalankan fungsi yang berbeda dapat menimbulkan konflik kepentingan. Ini pun merupakan dasar dari disusunnya konsep Trias Politika (pemisahan kekuasaan).

Nilai adalah komoditas utama yang berusaha didistribusikan oleh struktur-struktur di setiap sistem politik yang wujudnya adalah:

1. Kekuasaan
2. Pendidikan atau penerangan
3. Kekayaan
4. Kesehatan
5. Kasih sayang
6. Kejujuran dan keadilan
7. Keseganan, respek

Nilai-nilai tersebut diasumsikan dalam kondisi yang tidak merata persebarannya di masyarakat sehingga perlu campur tangan struktur-struktur yang punya kewenangan (otoritas) untuk mendistribusikannya pada elemen-elemen masyarakat yang seharusnya menikmati. Struktur yang menyelenggarakan pengalokasian nilai ini, bagi Easton, tidak dapat diserahkan kepada lembaga yang tidak memiliki otoritas, haruslah negara dan pemerintah sebagai aktornya.

Norma dapat diartikan sebagai peraturan yang tertulis maupun tidak, yang mengatur tata hubungan antar aktor di dalam sistem politik. Norma ini

terutama dikodifikasi di dalam konstitusi (undang-undang dasar) suatu negara. Setiap konstitusi memiliki rincian kekuasaan yang dimiliki struktur input, proses, dan output. Konstitusi juga memuat mekanisme pengelolaan konflik antar aktor-aktor politik di saat menjalankan fungsinya, dan menunjuk aktor (sekaligus) lembaga yang memiliki otoritas dalam penyelesaikan konflik. Norma dalam suatu negara berbeda satu sama lain, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai perbandingan kerja sistem politik suatu negara dengan negara lain.

Umumnya, tujuan suatu sistem politik terdapat di dalam mukadimah atau pembukaan konstitusi suatu negara. Tujuan sistem politik Indonesia termaktub di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sementara tujuan sistem politik Amerika Serikat termaktub di dalam *Declaration of Independence*.

Input dan output adalah dua fungsi dalam sistem politik yang berhubungan erat. Apapun output suatu sistem politik, akan dikembalikan kepada struktur input. Struktur input akan bereaksi terhadap apapun output yang dikeluarkan, yang jika positif akan memunculkan dukungan atas sistem, sementara jika negatif akan mendampak muncul tuntutan atas sistem. Umpan balik (*feedback*) adalah situasi di mana sistem politik berhasil memproduksi suatu keputusan ataupun tindakan yang direspon oleh struktur output.

C. Perkembangan Sistem Politik Indonesia

Sistem politik Indonesia berdasar pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UUD 1945. Sehingga setelah adanya amandemen, sistem politik Indonesia mengalami banyak perubahan di dalamnya. Berikut merupakan perbedaan sistem politik Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945.

1. Sistem Politik Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945 Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang berarti kedaulatan berada ditangan rakyat yang sepenuhnya dijalankan oleh

MPR. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah presidensiil, dimana presiden berkedudukan sebagai kepala negara serta kepala pemerintahan. UUD 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia yang mengatur kedudukan dan tanggung jawab penyelenggaraan negara, kewenangan, tugas, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara. UUD 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara.

Lembaga legislatif negara terdiri atas MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara dan DPR. Lembaga eksekutif negara terdiri atas presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden serta kabinet dalam menjalankan tugasnya. Kemudian Lembaga yudikatif negara yang bertugas untuk menjalankan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh MA sebagai lembaga kehakiman tertinggi dan dibantu oleh badan-badan kehakiman lain yang berada dibawahnya.

2. Sistem Politik Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945 Pokok-pokok sistem politik di Indonesia setelah amendemen UUD 1945 adalah sebagai berikut:

a. Bentuk negara adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. NKRI terbagi dalam 34 daerah provinsi dengan menggunakan prinsip desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

b. Kekuasaan eksekutif berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden beserta wakilnya dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab pada parlemen, dan tidak dapat membubarkan parlemen. Masa jabatan presiden beserta wakilnya adalah 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

c. Tidak ada lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Yang ada lembaga- lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, BPK, presiden, MK, KY dan MA.
d. DPA ditiadakan yang kemudian dibentuk sebuah dewan pertimbangan yang berada langsung dibawah presiden.
e. Kekuasaan membentuk UU ada ditangan DPR. Selain itu DPR menetapkan anggaran belanja negara dan mengawasi jalannya pemerintahan. DPR tidak dapat dibubarkan oleh presiden beserta kabinetnya, tetapi dapat mengajukan usulan pemberhentian presiden kepada MPR.

B. Sejarah Sistem Politik Indonesia

Sistem Politik Indonesia mengalami tiga periode masa, diantaranya masa orde lama (1945-1966), masa orde baru (1966-1988), dan masa reformasi (1988-sekarang). Sistem politik waktu ini mengalami reinkarnasi sistem yang berbeda dengan simbolisasi yang hampir sama. Ketiga masa ini saling berkaitan antara satu masa dengan masa yang lain. Sistem politik orde lama patinya memiliki kekurangan dan kelebihan, kekurangan tersebut yang nantinya akan diperbaiki dan disempurnakan pada sistem politik orde baru. Begitupun kekurangan dan kelebihan yang ada pada sistem politik orde lama, semuanya akan diperbaiki dan disempurnakan dalam sistem politik orde reformasi. Sementara itu, kegagalan dan kekurangan yang ada dalam sistem politik Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem kerja dan pelembagaan politik yang masih prematur.

1. Masa Orde Lama

Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia merupakan masa yang merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang mana berlangsung dari tahun 1945 sampai tahun 1966. Dalam sistem politik orde lama, negara menggunakan prinsip-prinsip demokrasi beserta nilainya namun dengan satu pengecualian. Negara dibuat dengan tujuan untuk

mensejahterakan masyarakat secara umum dan juga untuk melindungi segenap bangsa yang ada di dalamnya, namun tugas negara tersebut haruslah berada dalam panduan dan pimpinan presiden selaku kepala negara dan tokoh sentral negara. Gagasan ini muncul karena disebabkan oleh keadaan sebelumnya dimana di masa demokrasi liberal yang sempat mengalami krisis politik berupa perseteruan antar partai politik di tubuh parlemen yang menyebabkan pemerintahan tidak berjalan dengan baik untuk menghasilkan program kerja kesejahteraan rakyat.

Ciri yang paling khas dari masa ini adalah adanya konsep demokrasi terpimpin, yaitu kehadiran peran dan campur tangan presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi. Terdapat lembaga tinggi negara yang berdiri pada periode Indonesia era demokrasi terpimpin, seperti Dewan Perwakilan Rakyat – Gotong Royong (DPR-GR), Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Dewan Perwakilan Rakyat – Gotong Royong (DPR–GR) adalah sebuah lembaga yang didirikan melalui sebuah Ketetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1960 (Tappres No. 3 Thn. 1960). Tujuan didirikannya lembaga ini sebagai tindak lanjut atas penolakan DPR–GR atas rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) yang diajukan pemerintahan Presiden Soekarno. Dalam praktiknya, pendirian DPR–GR mengalami perubahan sesuai dengan kebijakan besar presiden mengenai demokrasi terpimpin. Keanggotaan DPR–GR ditunjuk melalui pilihan presiden alih-alih murni berdasarkan mekanisme pemilihan parlemen. Dengan demikian, parlemen tidak berfungsi sebagaimana mestinya menjadi mitra dan pengimbang pemerintah karena parlemen berisi orang-orang pilihan Presiden Soekarno sendiri yang tentu akan lebih

memiliki kecondongan untuk selalu pro terhadap kebijakan Presiden Soekarno selaku pemerintah. Ini juga dianggap sebagai bentuk aplikasi demokrasi terpimpin yang menekankan komando, peran, dan pengaruh presiden dalam banyak aspek pemerintahan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) adalah sebuah lembaga yang didirikan melalui sebuah Ketetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 (Tappres No. 2 Thn. 1959). Tujuan didirikannya lembaga ini adalah memenuhi amanat Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 sebagaimana yang disebutkan dalam bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam praktiknya, pendirian MPRS mengalami perubahan sesuai dengan kebijakan besar presiden mengenai demokrasi terpimpin. Keanggotaan MPRS ditunjuk melalui pilihan presiden alih-alih murni berdasarkan mekanisme pemilihan parlemen. Selain itu, putusan MPRS yang menganggat Soekarno sebagai presiden seumur hidup juga dianggap bentuk aplikasi demokrasi terpimpin yang menekankan komando presiden dalam banyak aspek pemerintahan.

Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) adalah sebuah lembaga yang didirikan melalui sebuah Ketetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1959 (Tappres No. 3 Thn. 1959). Tujuan didirikannya lembaga ini adalah memenuhi amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagaimana yang disebutkan dalam bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung. Dalam praktiknya, pendirian DPAS mengalami perubahan sesuai dengan kebijakan besar presiden mengenai demokrasi terpimpin. Keanggotaan DPAS ditunjuk melalui pilihan presiden alih-alih berdasarkan mekanisme yang sesuai dengan prinsip persaingan dan kompetensi.

Selain itu ada Front Nasional yang merupakan sebuah organisasi massa yang berdiri pada periode Indonesia era demokrasi

terpimpin. Organisasi ini didirikan melalui sebuah Ketetapan Presiden Nomor 13 Tahun 1959 (Tappres No. 13 Thn. 1959). Tujuan didirikannya organisasi ini adalah upaya Presiden Soekarno untuk memobilisasi massa dalam rangka menggalang dukungan rakyat untuk memperjuangkan wilayah Irian Barat. Secara formal, Front Nasional ditujukan untuk menyatukan seluruh kekuatan nasional dalam rangka menyukseskan pembangunan. Upaya tersebut dapat diturunkan dalam bentuk tugas yang harus diemban Front Nasional seperti: (1) Menyelesaikan revolusi nasional, (2) Melaksanakan pembangunan, dan (3) Mengembalikan Irian Barat.

Era Orde Lama yang berlangsung selama setidaknya 22 tahun ini, hampir tidak terjadinya pembangunan terkecuali pembuatan sebuah sarana olahraga yang berlokasi di Senayan yang digunakan untuk perhelatan Asian Games IV dan Ganefo atau yang merupakan singkatan dari *games of the news emerging forces* merupakan sebuah pesta olahraga yang dibuat dan digagaskan oleh Presiden Soekarno yang memiliki tujuan menyaingi Olimpiade. Serta dalam era Orde Lama ini dibangun pula Bendungan Jatiluhur, Pabrik Baja Krakatau Steel. Namun, untuk penyelesaian ketiga sarana ini baru terjadi di era Orde Baru. Dalam era ini juga kita bisa melihat adanya pembangunan Masjid Istiqlal serta Monas atau singkatan dari Monumen Nasional yang merupakan sebuah monumen peringatan kemerdekaan Indonesia.

Pada tahun 1960 sendiri, adanya rencana pemerintah untuk Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun, namun rencana tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar dikarenakan negara Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk berperang melawan Belanda dalam rangka merebut kembali Irian Barat. Selain

itu, adanya iklim politik yang tidak kondusif juga menjadi salah satu penyebabnya.

Selama era Orde Lama yang berlangsung 22 tahun ini yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dimana adanya sistem presidensial yang berlaku hanya delapan tahun, di tahun 1945 hingga tahun 1949 terjadinya peperangan dalam menjaga kemerdekaan, segala daya serta upaya yang dilakukan bangsa Indonesia saat itu untuk mempertahankan kemerdekaannya dan berperang melawan agresi militer negara Belanda yang saat itu ingin menjajah Indonesia lagi. Pada periode itu juga, terjadi dua kali pemberontakan yang terdiri dari pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Muso di Madiun pada September 1948 dan pemberontakan kedua yang dilakukan oleh Negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo pada Agustus 1949.

Pada Masa Orde Lama ini muncullah beberapa kerusuhan yang terjadi di negeri ini akibat dari jaannya sistem pemerintahan yang tidak sesuai dengan ekspetasi masyarakat indonesia. Kerusuhan tersebut antara lain:

a. **Berbagai Pemberontakan**

   Adanya penggunaan UUD Republik Indonesia Serikat dan UUDS 1950 pada periode tahun 1950 hingga tahun 1959 yang memiliki nilai serta menganut sistem parlementer dimana kekuasaan pemerintahan berada di tangan perdana menteri. Dalam periode tahun ini, banyak terjadinya beberapa pemberontakan, diantaranya pemberontakan Andi Azis pada tahun 1950, pemberontakan Permesta pada tahun 1958, serta pemberontakan Kahar Muzaki pada tahun 1962.

Adanya beberapa pemberontakan tersebut memberikan dampak negatif pada jalannya sistem pemerintahan yang ada pada negeri ini, yang mana selama sembilan tahun tersebut kabinet mengalami jatuh bangun akibat adanya pemberontakan. Hal ini disebabkan selama periode tersebut terjadi pergantian perdana menteri sebanyak delapan kali, serta ada kabinet yang hanya memiliki usia jabatan selama tiga bulan. Dengan situasi politik yang seperti itu, serta keamaan masyarakat yang terancam, mengakibatkan hampir tidak adanya pembangunan yang terjadi pada negeri ini sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi terabaikan.

b. Perang dengan Belanda dan Malaysia

Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden saat itu yaitu Soekarno mengeluarkan dekrit kembali dan mengumumkan bahwa pemerintahan akan kembali ke UUD 1945. Dengan adanya pemberlakuan UUD 1945 kembali maka sistem presidensial juga kembali. Dimana presiden yang menjadi kepala pemerintahan di sebuah negara. Setelah kekuasaan eksekutif yang tadinya ada pada perdana menteri berpindah kembali ke tangan Presiden Soekarno, masalah Irian Barat yang seharusnya sudah dirundingkan satu tahun setelah adanya perjanjian Konferensi Meja Bundar atau KMB namun tidak dilaksanakan, dituntut untuk segera dijalankan kembali oleh Presiden Soekarno. Karena dari pihak Belanda yang tetap menolak untuk merundingkan masalah mengenai Irian Barat ini, maka pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan lain untuk mengambil kembali Irian Barat dari tangan pihak Belanda menggunakan kekuatan militer yaitu perang.

Dalam mempersiapkan perang tersebut, Indonesia membeli alat utama sistem persenjataan atau alutsista secara besar-besaran dengan cara mengutang kepada negara Rusia. Dengan melakukan hal tersebut, Indonesia pada saat tersebut memiliki persenjataan yang terkuat di dunia khususnya pada bagian selatan khatulistiwa. Presiden Soekarno pada saat itu memilih panglima untuk memimpin jalannya perang dengan pihak Belanda yaitu pemimpin palagan Serangan Umum 1 Maret Letnan Kolonel Soeharto. Pemilihannya tersebut dikarenakan Presiden Soekarno sudah mengenal Soeharto sejak pemerintahan Indonesia mengungsi ke Yogyakarta.

Di Maret 1962, Soeharto yang sudah menyandang pangkat Mayor Jenderal tersebut ditunjuk untuk menjadi Panglima Mandala Pembebasan Irian Barat. Setelah mempersiapkan diri untuk menghadapi perang melawan pihak Belanda dengan alutsista dalam skala besar untuk merebut kembali Irian Barat, pada akhirnya masalah yang ada terselesaikan melalui jalur perundingan di PBB. Setelah selesainya urusan membebaskan Irian Jaya tersebut, Indonesia kembali untuk mempersiapkan diri untuk memulai perang melawan Malaysia yang disebut sebagai negara boneka yang dibuat oleh bangsa Inggris.

c. Tujuh Kali Usaha Membunuh Presiden

Selama masa jabatannya, Presiden Soekarno sudah mengalami percobaan pembunuhan setidaknya sebanyak tujuh kali. Hal tersebut menjadi sebuah gambaran bagaimana situasi saat itu dimana keamanan tidak terjaga dan suasana tidak kondusif.

Usaha pembunuhan yang pertama terjadi dengan adanya kejadian penggranatan di Perguruan Cikini. Tepatnya pada

tanggal 30 November 1957, yang merupakan ulang tahun ke lima belas dari Perguruan Cikini dan dihadiri Presiden Soekarno sebagai wali murid dari Megawati. Namun, secara tiba-tiba beberapa granat meledak di tengah penyambutan presiden, akibat insiden ini ada tiga orang tewas yang termasuk ke dalamnya yaitu pengawal presiden.

Usaha pembunuhan yang kedua terjadi pada tanggal 9 Maret 1960, dimana terjadinya ledakan yang berasal dari hasil tembakan cannon 23mm pesawat Mig-17 yang dipiloti oleh Daniel Maukar ditembakkan ke istana. Tembakan tersebut kemudian mengenai pilar yang membuatnya jatuh tidak jauh dari meja kerja Presiden Soekarno saat itu. Namun, untungnya presiden pada saat itu sedang tidak berada di dekat meja kerjanya.

Usaha pembunuhan yang ketiga terjadi pada bulan April 1960, pada saat itu Presiden Soekarno sedang melakukan perjalanan ke Bandung. Ketika mobil yang ditumpangi Presiden melewati jembatan Rajamandala, tiba- tiba sekelompok anggota DI/TII menghadang jalannya mobil dan melemparkan granat, namun untungnya granat tersebut tidak mengenai presiden.

Usaha pembunuhan yang keempat dan kelima terjadi di tempat yang sama dimana Presiden Soekarno berusaha dibunuh saat berada di Makassar. Yang pertama terjadi tepatnya di jalan Cendrawasih melalui pelemparan granat, dan yang kedua terjadinya penembakan menggunakan mortir pada tahun 1960. Peristiwa yang terjadi ini dikenal dengan Peristiwa Mandai.

Usaha pembunuhan yang keenam, merupakan usaha pembunuhan dengan cara menembak yang dilakukan oleh

anggota DI/TII bernama Bachrum. Kejadian ini terjadi di halaman istana, Bachrum yang berada di shaf depan ketika sedang berjamaah shalat Idul Adha di Masjid Baiturrahman. Hal ini terjadi ketika Bachrum melibat Presiden Soekarno, dan langsung mengambil pistol yang ada dibalik jasnya dan mencoba menembakkannya ke arah presiden yang saat itu berjarak kurang dari lima meter. Namun untungnya, arah peluru tersebut melenceng dan mengenai Ketua DPR GR KH Zainul Arifin, sehingga Presiden Soekarno bisa selamat.

Usaha pembunuhan yang ketujuh terjadi pada Desember 1964, dimana ketika Presiden Soekarno sedang berada dalam perjalanan dari Bogor menuju Jakarta. Ketika beliau berada di Cimanggis, tiba-tiba sebuah granat dilempar oleh seorang laki-laki ke mobil presiden. Namun untungnya, jarak antara titik melempar berada diluar jangkauan laju mobil sehingga Presiden Soekarno dapat selamat.

2. Masa Orde Baru

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Awal dari masa pemerintahan di era Orde Baru muncul setelah dikeluarkannya surat perintah yang berlaku selama kurang lebih 32 tahun pada 11 Maret 1966 hingga 1988. Diangkatnya Soeharto menjadi Presiden Indonesia juga menandakan era Orde Baru menggantikan Presiden Soekarno sebelumnya. Penamaan Orde Baru ini digunakan sebagai perbandingan dengan masa sebelumnya, yaitu Orde Lama.

Di masa orde baru ini, sistem pemerintahannya masih menggunakan presidensial dimana keputusan eksekutif ada ditangan presiden serta memiliki bentuk pemerintah yaitu republik. Dasar

konstitusi dari negara Indonesia adalah UUD 1945. Berdasarkan Encyclopaedia Britannica (2015), pada masa Orde Baru ini pemerintah menekankan pada adanya stabilitas nasional baik dalam program politiknya dan juga rehabilitas ekonomi yang ada, serta berkepribadian dan juga fokus pada bidang sosial budaya.

Pada masa ini juga terjadi kemajuan dalam demokrasi di Indonesia. Dimana seperti yang dapat dilihat dari hasilnya, inflasi menurun dan mata uang Indonesia menjadi lebih stabil. Namun, walaupun mengalami perkembangan tersebut, kekuasaan dari seluruh pemerintahan pada saat itu ada di tangan presiden seutuhnya. Hal itu yang menyebabkan runtuhnya era Orde Baru dikarenakan adanya krisis moneter di tahun 1997. Setelah adanya krisis tersebut, kondisi ekonomi negara Indonesia semakin memburuk, dan hal ini bukan hanya dialami Indonesia saja namun juga berbagai negara lain.

Kondisi yang terjadi pada saat itu membuat korupsi, kolusi, serta nepotisme atau KKN menjadi semakin tinggi dan angka kemiskinan juga meningkat. Adanya ketimpangan yang mencolok antara kedua pihak tersebut, memicunya gerakan demokrasi dalam rangka menuntut adanya perbaikan ekonomi dan juga reformasi total pada pemerintahan Indonesia. Era Orde Baru yang ada berakhir pada tahun 1998 dengan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden yang membuat kemunculan era reformasi.

Ciri-ciri Pemerintahan pada Orde Baru

a. Kuatnya Pengaruh Militer atau Dwifungsi ABRI

   Ciri yang pertama dari pemerintahan pada Orde Baru adalah kuatnya pengaruh militer dan ABRI. Hal ini memang sudah terlihat sejak Orde Lama, dimana dalam kabinet Dwikora berisikan dari banyak perwira tinggi Angkatan Darat. Namun,

pada Orde Baru terjadi perubahan dimana fungsi ABRI dalam tingkat sipil menjadi lebih kuat lagi. Partai Golongan Karya yang merupakan mesin politik utama dari pemerintah Orde Baru berisikan banyak anggota militer.

ABRI yang ada juga memiliki kegiatan sipil yang terdiri dari ABRI Masuk Desa, dan juga menduduki jabatan sipil serta militer disaat yang bersamaan. Selain itu, banyak anggota ABRI yang menjadi komisaris berbagai perusahaan besar di Indonesia, yang menjadi salah satu tanda adanya KKN di dalam pemerintahan Orde Baru.

b. Terbatasnya Pilihan Politik

Ciri yang kedua dari pemerintahan pada Orde Baru adalah terbatasnya pilihan politik. Hal ini dapat dilihat melalui pemilu pada tahun 1971 yang diikuti oleh setidaknya sembilan partai politik serta satu golongan karya, dan bandingkan dengan pemilu pada tahun 1977 yang hanya diikuti oleh dua partai politik yaitu PDI dan PPP serta satu golongan karya. Hal yang terjadi ini dilakukan untuk membatasi adanya ideologi baru yang berkembang. Hal ini dikarenakan, pemerintah mengira bahwa kekacauan yang terjadi di Orde Lama disebabkan banyaknya ideologi baru yang berkembang. Penyederhanaan tersebut diharapkan dapat menciptakan kestabilan dalam politik pemerintah.

c. Pembangunan yang Masif

Ciri yang ketiga dari pemerintahan pada Orde Baru adalah pembangunan yang masif, hal ini dikarenakan pemerintah pada masa ini memfokuskan dan menjadikan pembangunan infrastruktur fisik maupun non-fisik sebagai prioritas tertingginya. Hal yang dilakukan ini merupakan sebuah respon

dari adanya kekacauan ekonomi pada tahun 1965. Pemerintah Indonesia membuka keran modal asing serta dalam negeri sebagai usahanya untuk membuka pintu usaha di Indonesia. Diharapkan dengan adanya hal tersebut pembangunan yang ada dapat berlangsung dengan lancar serta perekonomian kembali normal.

d. Pemerintahan Sentralistik

Ciri yang keempat dari pemerintahan pada Orde Baru adalah pemerintahan yang sentralistik yang pada dasarnya sudah berjalan sejak awal kemerdekaan Indonesia terjadi. Hal ini terjadi karena sistem kenegaraan yang masih belum rekat dan setara di berbagai daerah. Pemerintahan yang bersifat sentralistik ini membuat adanya kendali pusat terhadap pemerintahan yang ada di daerah, hal ini dikarenakan segala keputusan yang diambil harus melalui pemerintah pusat terlebih dahulu.

3. Masa Reformasi

Masa reformasi adalah masa perubahan dari masa sebelumnya. Di Indonesia masa reformasi terjadi pada tahun 1998, yaitu masa peralihan dari orde baru (pemerintahan soeharto) ke masa selanjutnya. Awal dari pemerintahan di era reformasi atau yang disebut sebagai masa transisi ini digunakan untuk membuka peluang dalam menata kehidupan yang lebih berdemokrasi. Masa reformasi dimulai dengan adanya kepemimpinan BJ. Habibie sebagai presiden untuk menggantikan Soeharto yang telah mengundurkan diri.

Mundurnya Presiden Soeharto dilatarbelakangi krisis moneter sejak 1997. Kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu tengah sangat melemah dan merosot sehingga menimbulkan ketidakpuasan

masyarakat. Ketidakpuasan ini kemudian semakin membesar dan memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai aksi mahasiswa di wilayah Indonesia. Kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akibatnya, pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pun mendapat banyak tekanan politik baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, Amerika Serikat secara terbuka meminta agar Soeharto mengundurkan dari jabatannya sebagai Presiden. Sedangkan dari dalam negeri, terjadinya gerakan mahasiswa yang turun ke jalan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya.

Kepemimpinan Soeharto semakin menjadi sorotan sejak terjadinya Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, di mana empat mahasiswa tertembak mati dan memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari kemudian. Tekanan dari para massa terhadap Soeharto pun memuncak ketika sekitar 15.000 mahasiswa mengambil alih Gedung DPR/MPR yang berakibat proses politik nasional lumpuh. Soeharto yang saat itu sudah terdesak masih berusaha untuk menyelamatkan kursi kepresidenannya dengan melakukan perombakan kabinet dan membentuk Dewan Reformasi. Tetapi, pemberontakan yang dilakukan oleh para mahasiswa ini membuat Presiden Soeharto tidak memiliki pilihan lain selain mengundurkan diri.

Pada 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, Presiden Soeharto secara resmi menyatakan dirinya berhenti menjabat sebagai Presiden Indonesia. Melalui UUD 1985 Pasal 8, Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden BJ Habibie disumpah untuk menjadi penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. Sejak saat itu, kepemimpinan beralih dari Soeharto ke BJ Habibie dan terbentuk Era Reformasi.

Reformasi yang ada di Indonesia sendiri terjadi pada tahun 1998, dimana merupakan awal kejatuhan Orde Baru setelah adanya

gerakan reformasi dari berbagai elemen masyarakat. Reformasi yang terjadi tersebut disebabkan semakin banyaknya krisis yang terjadi seperti politik, ekonomi, hukum, sosial, dan juga krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang ada. Hal ini dikarenakan, setiap kegiatan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada saat itu tidak diimbangi dengan adanya pembentukan mental para pelaksana pemerintahnya yang membuat banyak terjadinya penyelewengan, penyimpangan, pemerintahan yang otoriter, dan juga yang terbesar KKN.

Pada masa reformasi ini, Presiden Habibie membuat reformasi berskala besar pada sistem pemerintahan yang ada. Sistem tersebut dijalankan dengan adanya keterbukaan dan nilai demokrasi yang lebih ditonjolkan. Pada masa ini juga, partai politik independen yang ada tidak lagi dipengaruhi oleh kekuasaan birokrat militer. Di era reformasi ini juga adanya pemberdayaan bagi masyarakat sipil dengan penyampaian informasi yang dilakukan secara transparan. Hal ini ditandai dengan adanya pemilu atau proses pemilihan secara langsung untuk presiden dan wakil presiden, kepala daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pemilihan umum tersebut pertama kali dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004. Demokrasi yang ada pada saat itu kemudian berkembang dengan adanya kesadaran masyarakat dalam kehidupan perpolitikan nasional.

Tujuan Adanya Masa Reformasi

a. Masa reformasi digunakan untuk menata kembali segala struktur pemerintahan dan kenegaraan, yang meliputi didalamnya perundang-undangan serta konstitusi yang menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai serta cita-cita yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia.

b. Masa reformasi diharapkan dapat menciptakan perubahan yang serius dan bertahap dalam menemukan berbagai nilai baru dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.
c. Masa reformasi diharapkan nantinya ada perbaikan dalam berbagai bidang kehidupan meliputi bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, serta bidang pertahanan dan keamanan.
d. Masa reformasi diharapkan dapat menghapuskan serta menghilangkan berbagai kebiasaan dan cara hidup masyarakat Indonesia yang tidak sesuai dengan hukum yang ada, seperti KKN, kekuasaan yang otoriter, segala penyimpangan yang terjadi serta penyelewengan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
e. Menuntut turunnnya harga-harga kebutuhan pokok (sembako) yang melonjak tinggi sejak Juli 1997 yang menjadikan krisis ekonomi.
f. Menuntut MPR agar tidak mencalonkan kembali Soeharto sebagai presiden untuk periode ketujuh.
g. Menjelang lengsernya Soeharto, para pejabat melakukan perjanjian simbolik dan beberapa langkah kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mencoba mengatasi keadaan dan mempertahankan kekuasaan (*buying time*).

Dampak adanya era reformasi

a. Kebebasan Mengemukakan Pendapat

   Kebebasan mengemukakan pendapat menjadi hak bagi setiap individu setelah adanya reformasi. Presiden BJ Habibie memberikan kebebasan serta ruang kepada siapapun yang ingin menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk rapat umum

maupun unjuk rasa atau demonstrasi. Namun, bagi para mahasiswa yang akan melakukan aksi demonstrasi, diharuskan terlebih dahulu untuk mendapatkan izin dari pihak yang berwenang (kepolisisan) serta menuentukan waktu serta tempat lokasi yang akan digunakan untuk demonstrasi. Hal demikian dilakukan karena mengacu dengan UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

b. Masalah Dwifungsi ABRI

Setelah reformasi dilaksanakan, peran ABRI di perwakilan rakyat DPR mulai dikurangi secara bertahap, yaitu dari yang tadinya berjumlah 75 orang menjadi 38 orang. Dahulu, ABRI terdiri dari empat angkatan, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian RI. Namun, sejak tanggal 5 Mei 1999, Polri telah memisahkan diri dari ABRI dan berganti nama menjadi Kepolisian Negara, istilah ABRI juga berubah menjadi TNI.

c. Reformasi Bidang Hukum

Reformasi pada bidang hukum dilakukan pada masa pemerintahan presiden BJ Habibie, di mana reformasi hukum ini disesuaikan dengan semua aspirasi yang berkembang di masyarakat sekitar. Masyarakat luas menyambutnya dengan baik terkait tindakan reformasi hukum yang dilakukan oleh presiden BJ Habibie. Hal tersebut dikarenakan reformasi hukum ini mengarah kepada tatanan yang telah diharapkan oleh masyarakat. Pasalanya, selama masa Orde Baru, karakter hukum yang berlaku di Indonesia cenderung bersifat konservatif, ortodoks, dan elitis.

Adapun hukum ortodoks sendiri adalah hukum yang bersifat tertutup, sehingga masyarakat sama sekali tidak

memiliki peran di dalam hukum tersebut. Hukum pada masa Orde Baru ini pun kemudian dianggap sebagai bentuk hukum yang mengebiri Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh sebab itu, presiden BJ Habibie ingin menciptakan bentuk hukum baru yang dapat menjamin keamanan serta perlindungan HAM. Sehingga hukum yang berlaku di era Orde Baru tidak lagi diterapkan pada masa reformasi.

Berikut beberapa demonstrasi yang terjadi pada era Reformasi:

a. Tragedi Trisakti

   Tragedi Trisakti menjadi salah satu tragedi yang paling membekas sepanjang Era Orde Baru yang terjadi pada 12 Mei 1998 silam untuk menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Peristiwa ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti krisis ekonomi, krisis politik, kirisis kepercayaan, serta krisis hukum. Dimana pada tahun 1998 Ekonomi Indonesia mulai goyah, yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang 1997-1999. Akibat dari peristiwa ini empat mahasiswa tewas tertembak serta puluhan mahasiswa terluka. Keempat mahasiswa itu adalah Elang Mulia Lesmana (1978-1998), Heri Hertanto (1977-1998), Hafidin Royan (1976-1998), dan Hendriawan Sie (1975-1998).

b. Insiden Berdarah di Medan 1998

   Pada saat maraknya terjadi kerusuhan Mei 1998, salah satu kota yang juga banyak terjadi pertumpahan darah adalah Kota Medan. Latar belakang kerusuhan ini adalah adanya krisis finansial Asia yang terjadi pada tahun 1997. Insiden berdarah di Medan ini terjadi pada 6 Mei 1998. Kota ini mengalami kerusuhan yang hampir melumpuhkan kota tersebut. Pada saat itu, ratusan toko/ruko serta kendaraan menjadi sasaran amuk

massa yang merasa kecewa terhadap pemerintahan saat itu. Setidaknya ada lima orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka akibat aksi unjuk rasa yang mereka lakukan.

c. Tragedi Gejayan atau Tragedi Yogyakarta

Tragedi Gejayan atau yang sering disebut juga dengan Tragedi Yogyakarta menjadi sebuah peristiwa bentrokan berdarah yang terjadi pada Jumat, 8 Mei 1998 di daerah Gejayan, Yogyakarta. Peristiwa ini berlangsung sampai malam hari. Adapun latar belakang terjadinya kerusuhan saat itu lantaran para demonstran mengunjuk rasa dan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya. Kekerasan antara aparat dan mahasiswa Yogyakarta pun tidak dapat terelakan, yang menyebabkan ratusan korban terluka, bahkan satu orang meninggal dunia, yaitu Moses Gatutkaca.

d. Tragedi Penjarahan dan SARA jelang Reformasi 1998

Setelah terjadinya tragedi pertumpahan darah di sejumlah daerah di Indonesia, suasana di Kota Jakarta kembali mencekam pada 13 sampai 15 Mei 1998. Kala itu, Indonesia tengah mengalami krisis moneter, di mana hutang menumpuk dan dollar semakin meningkat. Belum selesai dengan krisis moneter, peristiwa nahas lain juga terjadi, di mana kios-kios di beberapa sudut Jakarta dibakar, wanita etnis Tionghoa mengalami pelecehan seksual, dan mereka diperkosa dengan cara yang sadis. Ratusan orang juga dikabarkan hilang serta tewas dalam kerusuhan ini. Bahkan sampai saat ini banyak warga yang tidak tau dimana keberadaan keluarganya setelah treagedi berdarah di 1998.

BAB III FUNGSI SISTEM POLITIK

Sistem politik pada negara Indonesia merupakan kesatuan atau kolektivitas seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan negara Indonesia, termasuk di dalamnya proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya. Tujuan sistem politik Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Input dalam sistem politik dibedakan menjadi dua, yaitu tuntutan dan dukungan. Tuntutan dalam hal ini muncul sebagai konsekuensi dari kelangkaan atas berbagai sumber yang langka dalam masyarakat atau kebutuhan masyarakat yang alokasinya belum merata; salah satu wujud kelangkaan tersebut adalah kebijakan. Dukungan dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar tetap terus berjalan.

Output dalam sistem politik meliputi keputusan dan tindakan. Keputusan dalam hal ini dimaksudkan pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan yang dilakukan sesuai dengan tuntutan atau dukungan yang diajukan masyarakat. Adapun tindakan dimaksudkan implementasi konkret atau tindakan nyata yang dilakukan pemerintah atas keputusan yang telah dibuat dan disepakati. Fungsi input sistem politik Indonesia meliputi:

1. Sosialisasi Politik
2. Rekrutmen Politik
3. Artikulasi Kepentingan
4. Agregasi Kepentingan
5. Komunikasi Politik.

Dalam menjelaskan fungsi input dan output sistem politik, hal yang perlu untuk dipahami adalah adanya konversi sebagai suatu proses yang menandai bekerjanya sebuah sistem politik. Dalam konversi ini terjadi interaksi antara faktor-faktor politik, baik yang besifat individu, kelompok, ataupun organisasi. Sejalan

dengan hal tersebut di atas, Almond mengelompokkan fungsi input dan output dalam beberapa bagian. Dalam sistem politik terdapat beberapa fungsi, di antara fungsi yang paling dominan adalah fungsi sosiologi politik. Sosialisasi politik merupakan cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh negara. Pembentukan sikap politik atau membentuk sikap dan keyakinan politik membutuhkan waktu yang panjang dan proses yang terus-menerus.

A. Fungsi Input

1. Sosialiasi Politik Dan Rekruitmen Politik.

   Secara sosiologis, sosialisasi merupakan proses di mana nilai-nilai aktual yang berlaku dalam masyarakat serta nilai-nilai ideal ditanamkan dalam objek tertentu. Sosialisasi politik secara khusus membentuk sikap dan pola tingkah laku politik seseorang. Dalam hal ini, sosialisasi politik berperan sebagai sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan keyakinan-keyakinan politik yang dianutnya kepada generasi berikutnya. Sosialisasi politik berlangsung secara berkesinambungan. Individu diharapkan dapat mengetahui, memahami, serta menghayati nilai-nilai politik tertentu. Proses sosialisasi politik dapat bersifat *manifest* (nyata) ataupun *latent* (tidak nyata).

   Sosialisasi politik yang bersifat nyata merupakan transmisi nilai dalam wujud informasi, sikap, pandangan, serta keyakinan politik secara eksplisit. Sedangkan sosialisasi politik yang tidak nyata mengacu pada proses di mana seseorang pada awalnya memperoleh nilai yang non-politis. Nilai-nilai non-politis tersebut, kemudian mempengaruhi keyakinan, cara pandang, serta sikapnya di bidang politik. Sosialisasi politik dapat memelihara kebudayaan politik masyarakat yang berkaitan dengan upaya konservatif dalam memelihara status sekaligus mengubah suatu budaya politik tertentu

sehingga tercipta kebudayaan politik baru. Dalam upaya transmisi nilai-nilai politik, dibutuhkan sarana yang disebut agen sosialisasi politik. Agen sosialisasi politik yang umum di antaranya adalah keluarga, *peer group* (teman dekat), sekolah, media massa, partai politik, LSM, pemerintah, serta organisasi politik.

Sosialisasi politik dapat diartikan sebagai proses yang dilalui seseorang dalam menentukan sikap dan orientasi terhadap fenomena-fenomena politik yang berlaku pada masyarakat tempat ia berada saat ini. Pada tahap ini terjadi proses penanaman nilai-nilai kebijakan bermasyarakat atau prinsip kebijakan menjadi warga negara yang efektif. Agen-agen sosialisasi politik terdiri atas enam agen, yaitu keluarga, kelompok bermain atau bergaul, sekolah, pekerjaan, media massa, dan kontak-kontak politik secara langsung.

Pendidikan sekolah, pengalaman keluarga, dan pengaruh pergaulan berperan dalam memperkuat keyakinan, tetapi dapat pula mengubahnya secara drastis. Sosialisasi politik dapat berwujud transmisi dan pengajaran. Artinya dalam sosialisasi itu terjadi interaksi antara suatu sikap dan keyakinan politik yang dimiliki oleh generasi tua terhadap generasi muda yang cenderung masih fleksibel menerima pengaruh ajaran.

Sedangan, rekrutmen politik adalah proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif ataupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang rekrut/ diseleksi adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan atau fungsi politik. Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda. Pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Di Indonesia, perekrutan politik berlangsung

melalui pemilu setelah setiap calon peserta yang diusulkan oleh partainya diseleksi secara ketat oleh suatu badan resmi. Seleksi ini dimulai dari seleksi administratif, penelitian khusus (litsus), yaitu menyangkut kesetiaan pada ideologi negara.

Tujuan rekrutmen politik adalah terpilihnya penyelenggara politik (pemimpin pemerintahan negara) dari tingkat pusat hingga tingkat terbawah (lurah/ desa) yang sesuai dengan kriteria (persyaratan) yang telah ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku dan/ atau yang ditentukan melalui konvensi (hukum tidak tertulis) yang berlaku dalam masyarakat (rakyat) Indonesia.

Masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban menjadi objek dalam rekrutmen politik adalah seluruh masyarakat Indonesia yang sah sebagai warga negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan kata lain, setiap WNI, baik pria maupun wanita tanpa membedakan suku, agama, ras, warna kulit, dan lain-lainnya, memiliki kedudukan yang sama untuk memperoleh kesempatan mengikuti rekrutmen politik di seluruh tingkatan (hierarki) atau struktur politik yang ada. Tentu saja seluruh WNI terlebih dahulu harus memenuhi kriteria (persyaratan) yang telah ditentukan oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 27, ayat 2, yang menyatakan bahva “Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan”.

Mekanisme dalam melaksanakan rekrutmen politik ini dapat dibagi dalam beberapa cara berikut.

a. Pemilihan Umum merupakan salah satu pola rekrutmen politik yang khusus dilakukan bagi setiap warga negara yang memiliki

hak politik (*political right*) serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UUD 1945 dan Peraturan perundangundangan lainnya. Peraturan perudang-undangan lainnya yang dimaksud adalah per aturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan bidang politik yang meliputi: 1) Undang-Undang No. 12 tahun 2003, tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD; 2) Undang-Undang No. 31 tahun 2002, tentang Partai Politik; 3) Undang-Undang No. 23 tahun 2003, tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; 4) Undang-Undang No. tahun 2004, tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD.

2. Artikulasi kepentingan

   Pada dasarnya, artikulasi kepentingan merupakan sebuah proses yang ditempuh agar kebutuhan dan kepentingan masyarakat dapat terpenuhi. Lazimnya, kebutuhan dan kepentingan masyarakat tersebut dikemukakan secara nyata melalui organisasi dan lembaga yang ada. Dalam masyarakat yang maju, pengartikulasian kepentingan masyarakat dilakukan oleh kelompok kepentingan, misalnya serikat buruh. Namun, kelompok kepentingan semacam itu belum terlalu berperan di negara-negara berkembang. Peran mereka biasanya dijalankan oleh penguasa atau tokoh masyarakat setempat.

3. Agregasi kepentingan.

   Agregasi kepentingan adalah sebuah proses yang fungsinya memadukan semua kepentingan anggota masyarakat yang telah diartikulasikan. Kepentingan yang telah diartikulasikan ini digabungkan dan dikelola sedemikian rupa dalam tingkat pembuatan keputusan sehingga menghasilkan sebuah alternatif kebijakan tertentu. Artikulasi, agregasi maupun pembuatan keputusan dapat

dilakukan oleh satu struktur. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa batasan antara ketiganya sangat tipis.

4. Komunikasi politik.

   Komunikasi politik mengacu pada proses penyampaian pesan-pesan atau informasi politik dari suatu sumber kepada sejumlah penerima pesan. Pesan atau informasi tersebut dapat berupa lambang, kata-kata lisan maupun tulisan, serta isyarat yang dapat mempengaruhi kedudukan seseorang yang ada dalam puncak suatu struktur kekuasaan tertentu. Fungsi komunikasi politik dapat bersifat formal maupun informal. Formal apabila informasi disampaikan melalui media formal, seperti radio, televisi, partai politik, dan sebagainya. Informal apabila proses penyampaian informasi dilakukan secara langsung melalui tatap muka (interpersonal). Misalnya, lobi politik yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah.

   Pembagian Teori Komunikasi dalam beberapa konsep disesuaikan dengan Sistem Politik yang berlaku di negara yang bersangkutan. W.L. Rivers, W. Schramm, dan C.G. Cristians dalam bukunya *Responsibility in Mass Communications* membagi dalam tiga konsep berikut.

   a. Konsep Komunikasi dalam Sistem Politik Authoritarianism

      Konsep ini adalah komunikasi politik yang di dalamnya lembaga suprastruktur politik mengatur, bahkan menguasai sistem komunikasi politik yang menghubungkan antara suprastruktur dan infrastruktur. Artinya negara lebih besar memiliki pengaruh dalam mengendalikan media komunikasi politik kepada masyarakat. Masyarakat tidak memiliki daya yang kuat untuk mengendalikan sistem komunikasi atau hanya bisa menerima semua pesan komunikasi politik yang disampaikan oleh negara atau pemerintah.

b. Konsep Politik dalam Sistem Politik Libertarianism.

   Pada konsep ini lembaga infrastruktur politik memiliki kewenangan yang besar untuk mengatur, bahkan menguasai sistem komunikasi politik yang menghubungkan antara suprastruktur dan infrastruktur politik. Artinya, masyarakat (*society*) lebih besar memiliki pengaruh dalam mengendalikan media komunikasi politik dalam kehidupan masyarakat dan negara. Negara hanya memiliki daya untuk memantau atau mengendalikan sistem komunikasi agar tidak melanggar semua aturan atau hukum yang berlaku dalam negara yang dapat berakibat kerugian pada masyarakat umum.

c. Konsep Komunikasi Politik dalam Sistem Politik Sosial *Responsibility Theory*

   Dalam komunikasi politik ini, lembaga suprastruktur politik mengatur, bahkan menguasai sebagian besar sistem komunikasi politik yang menghubungkan antara suprastruktur dan infrastruktur. Artinya negara lebih besar memiliki pengaruh dalam mengendalikan media komunikasi politik kepada masyarakat. Masyarakat tidak memiliki daya yang kuat untuk mengendalikan sistem komunikasi politik atau hanya bisa menerima sebagian besar pesan komunikasi politik yang disampaikan oleh negara atau pemerintah. Menurut Sumarno A.P., unsur komunikasi politik meliputi dua unsur, yaitu:

   1. Unsur komunikasi politik dalam lembaga suprastruktur. Unsur ini terdiri atas tiga kelompok, yaitu yang berada pada lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Ketiga kelompok tersebut terdiri atas Elite Politik, Elite Militer, Teknokrat, *Profesional Group*.

2. Unsur komunikasi politik dalam lembaga infrastruktur politik. Unsur ini terdiri atas beberapa kelompok, yaitu partai politik, *interest group*, media komunikasi politik, kelompok wartawan (sebagai within-put), kelompok mahasiswa (sebagai within-put), para tokoh politik, fungsi komunikasi politik.

B. Fungsi Output

1. Pembuatan Kebijakan

   Pembuatan keputusan (*rule making*) adalah salah satu fungsi output. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa proses pembuatan keputusan terdiri atas beberapa tahap sebelum ia melahirkan kebijakan tertentu. Tahapan tersebut mencakup artikulasi dan agregasi kepentingan. Biasanya, keputusan politik termaktub dalam peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif bekerja sama dengan pemerintah.

2. Penerapan Kebijakan

   Penerapan keputusan (*rule application*) adalah proses menjalani peraturan yang telah ditetapkan. Lazimnya, fungsi ini dijalankan oleh lembaga eksekutif. Penerapan kebijakan dalam hal ini merupakan penerapan aturan umum undang-undang dan peraturan lain ke tingkat warga negara. Hal ini dimaksudkan agar sebuah lembaga melakukan tindakan administrasi untuk mengimplementasikan peraturan yang telah dibuat ke ranah publik. Fungsi penerapan kebijakan dilaksanakan oleh badan eksekutif yang meliputi dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah.

3. Penghakiman Kebijakan

   Penghakiman keputusan (*rule adjudication*) adalah proses menghakimi tindakan-tindakan yang dianggap menyimpang dan

melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Pada hakikatnya, fungsi ini ditujukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan atas peraturan-peraturan yang dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Sesuai dengan namanya maka lembaga yang berwenang menjalankan fungsi ini adalah lembaga yudikatif.

C. Memahami Sistem Politik Indonesia

Dalam memahami sistem politik Indonesia, seperti halnya memahami sistem-sistem lain, ada beberapa variabel yang perlu diketahui. Variabel-variabel kunci dalam memahami sebuah sistem adalah sebagai berikut.

1. Struktur adalah lembaga politik yang memiliki keabsahan dalam menjalankan fungsi sistem politik. Dalam konteks negara (sistem politik), misalnya struktur input, proses, dan output. Struktur input bertindak selaku pemasok komoditas dalam sistem politik, struktur proses bertugas mengolah masukan dari struktur input, sedangkan struktur output bertindak selaku mekanisme pengeluarannya. Hal ini mirip dengan organisme yang membutuhkan makanan, pencernaan, dan metabolisme untuk tetap bertahan hidup.

   Struktur input, proses, dan output umumnya dijalankan oleh aktor-aktor yang dapat dikategorikan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga aktor ini menjalankan tugas kolektif yang disebut sebagai pemerintah. Namun, setiap aktor yang mewakili struktur harus memiliki fungsi yang berbeda-beda: Tidak boleh suatu fungsi dijalankan oleh struktur yang berbeda karena akan menimbulkan konflik kepentingan. Ini pun merupakan dasar dari disusunnya konsep Trias Politika (pemisahan kekuasaan) seperti digagas para pionirnya dalam masalah abad pencerahan seperti John Locke dan Montesquieu.

2. Nilai adalah komoditas utama yang didistribusikan oleh struktur-struktur di setiap sistem politik yang wujudnya adalah kekuasaan,

pendidikan atau penerangan, kekayaan, kesehatan, keterampilan, kasih sayang, kejujuran dan keadilan, keseganan, respek. Nilai-nilai tersebut diasumsikan dalam kondisi yang tidak merata persebarannya di masyarakat sehingga memerlukan campur tangan struktur-struktur yang memiliki kewenangan (otoritas) untuk mendistribusikannya pada elemen-elemen masyarakat yang seharusnya menikmati. Menurut Easton, struktur ini adalah negara dan pemerintah sebagai aktornya.

3. Norma adalah peraturan, baik tertulis maupun tidak, yang mengatur tata hubungan antaraktor dalam sistem politik. Norma ini dikodifikasi dalam konstitusi (undang-undang dasar) suatu negara. Setiap konstitusi memiliki perincian kekuasaan yang dimiliki struktur input, proses, dan output. Konstitusi juga memuat mekanisme pengelolaan konflik antaraktor politik dalam menjalankan fungsinya, dan menunjuk aktor (sekaligus) lembaga yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan konflik. Setiap negara memiliki norma yang berlainan sehingga konsep norma ini dapat pula digunakan sebagai parameter dalam melakukan perbandingan kerja sistem politik suatu negara dengan negara lain.
4. Tujuan sistem politik, seperti halnya norma, juga terdapat dalam konstitusi. Umumnya, tujuan sistem politik terdapat dalam pembukaan konstitusi suatu negara. Tujuan sistem politik Indonesia termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.
5. Input dan output adalah dua fungsi dalam sistem politik yang berhubungan erat. Apa pun output suatu sistem politik, akan dikembalikan pada struktur input. Struktur input akan bereaksi terhadap output yang dikeluarkan, yang jika positif memunculkan dukungan atas sistem, sementara jika negatif mendampak muncul tuntutan atas sistem. Umpan balik (*feedback*) adalah situasi dalam

sistem politik yang berhasil memproduksi suatu keputusan ataupun tindakan yang direspons oleh struktur output.

Saat ini Sering kali kita saksikan di sekitar kita ataupun melalui media massa berbagai ketidakpuasan dari berbagai golongan masyarakat kepada pemerintah dalam berbagai kasus, demikian pula tindakan-tindakan anarkis saling serang antar kelompok masyarakat yang kesemuanya itu menunjukkan terjadinya konflik vertikal dan horizontal di Indonesia. Ini semua merupakan fenomena yang menjadi tantangan sistem sosial Indonesia sampai sekarang. Persoalannya tentu kembali pada seberapa mampu rakyat Indonesia menyikapi konflik sosial yang ada, dan bagaimana sebenarnya yang dikehendaki rakyat Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia didapat dari perjuangan melawan penjajah Belanda dan Jepang.

Keberadaan oposisi pada pemerintahan sangat bermanfaat berkaitan dengan pertanggungjawaban yang harus diemban oleh pemerintahan, karena tidak semua kebijakan yang diambil dianggap mewakili aspirasi masyarakat, dan keberadaan kelompok ini mengahruskan pemerintah demokratis dalam membuat kebijakan publik, dan disertai dengan alasan-alasan, mengapa kebijakan itu dibuat, dasarnya apa, tujuan dari pembuatan kebijakan, dan bagaimana dampaknya di masyarakat. Istilah sistem politik mengandung pengertian kepada sebuah proses pengambilan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah.

Aspek yang terdapat dalam sistem politik merupakan sebuah perjuangan kelompok tertentu di dalam negara untuk memperoleh posisi di pemerintahan dengan melalui sebuah proses pemilihan umum. Sebagai salah satu contohnya yaitu negara indonesia yang memiliki sistem demokrasi yang mana dalam memilih wakil raykat yaitu seorang yang memiliki kekuasaan yang disebut pemerintah, dimana rakyat memilih langsung wakil rakyatnya dalam pemilihan umum. Menurut Haricahyono berbicara mengenai sistem politik, berarti membicarakan mengenai tatanan kehidupan di masyarakat, dan mengatur

mengenai keberadaan peran dari lembaga infrastruktur politik dan lembaga suprastruktur politik.

Seorang ahli politik Gabriel Almond merumuskan bahwa sistem politik merupakan interaksi pada masyarakat independen yang menjalankan fungsifungsi integrasi dan adaptasi, dengan menggunakan pelayanan atau pemaksaan oleh para pegawai, yang sedikit atau banyak menggunakan tekanan fisik yang sifatnya terlegitimasi. Gabriel Almond adalah seorang ahli ilmu politik yang menggunakan pendekatan struktural fungsional untuk menjelaskan sistem politik. Pendekatan ini berusaha menjelaskan bagaimana bentuk struktur-struktur dalam sistem politik menjalankan fungsi-fungsinya. Almond mencoba mengadakan perbandingan atas prosedur dan cara bekerja suatu sistem politik.

Almond menekankan apakah ada persamaan dan perbedaan dari struktur-struktur politik dalam menjalankan fungsi-fungsinya di dalam suatu sistem politik, yaitu yang bersifat oligarki, monarki, demokratis ataupun totaliter. Almond membahas kemampuan sistem politik dalam mengatasi pengaruh lingkungan dalam ataupun lingkungan luar terhadap dirinya. Menurutnya dengan mengetahui kemampuan sistem politik, kita dapat menilai apakah sistem politik di suatu negara akan stabil atau tidak. Cara mengukur kemampuan suatu sistem politik, yaitu dengan memperhatikan input-input atau pengaruh-pengaruh yang masuk ke dalam sistem politik, baik itu dari lingkungan dalam maupun dari lingkungan luar.

Pada level praktis, sistem politik sering kali dikaitkan dengan kelembagaan politik yang ada, budaya politik dan perilaku-perilaku politik. Dalam hal ini, ada enam jenis kemampuan (kapabilitas) yang perlu dimiliki oleh setiap sistem politik Kapabilitas sistem politik yang bersifat ekstraktif terkait dengan kemampuan untuk mengelola sumber-sumber daya. Hal ini meliputi sumbersumber material yang dimiliki oleh sistem politik, misalnya kekayaan alam dan jumlah penduduk. Persoalan terhadap kapabilitas jenis ini

cenderung muncul saat sumber-sumber ekstraktif ini dieksploitasi, digunakan bukan untuk kepentingan nasional atau kemudian dinikmati dengan distribusi yang tidak adil.

Penyelewengan, penyalahgunaan wewenang dan korupsi dapat disebut sebagai contoh dari penggunaan kekayaan ekstraktif yang tidak benar. Ukuran terhadap kapabilitas ekstraktif ini, misalnya tampak dari pengelolaan pendapatan daerah ataupun nasional. Sesuai amanat undang-undang, kapabilitas ekstraktif ini tentunya harus dipakai untuk mendukung pembangunan nasional, baik melalui pengelolaan secara otonom di daerah ataupun terpusat (nasional). Tujuan umumnya tentu untuk kesejahteraan masyarakat yang harus dicapai dengan penggunaan berbagai sumber daya itu secara benar, efektif, dan efisien.

Pengingkaran terhadap potensi kapabilitas yang demikian tentu bersifat kontra produktif dengan arah pembangunan yang diharapkan dapat terdukung oleh tersedianya sumber-sumber yang terkategori ekstraktif ini. Kapabilitas sistem politik yang bersifat regulatif terkait dengan kemampuan sistem politik untuk mengendalikan atau mengatur tingkah laku individu-individu ataupun kelompok individu yang ada dalam sistem politik. Kemampuan sistem politik ini dapat diketahui dari pola-pola tingkah laku individu ataupun kelompok, serta pengendalian yang dilakukan oleh sistem politik. Acuan dasar dari kapabilitas ini berupa konstitusi dan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang ada di bawahnya.

Harapan dari adanya kapabilitas regulatif ini adalah terselenggaranya tertib sosial, terjaganya persatuan, dan kesatuan bangsa, serta maksimalisasi bekerjanya sistem politik yang sudah ditentukan. Persoalan muncul ketika kapabilitas regulatif ini dipermainkan oleh sejumlah individu atau kelompok untuk menekan dan memaksa kelompok lain mengikuti kemauan dan aturan yang mereka jalankan. Persoalan juga muncul dalam kaitannya dengan sumber daya manusia yang mestinya mengemban amanat untuk menegakkan regulasi

yang ada, namun dengan kewenangannya itu justru kemudian menggunakan regulasi atas dasar kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya sendiri. Pada titik seperti ini sesungguhnya kapabilitas regulatif suatu sistem politik telah dimandulkan dan menjadi hancur.

Kapabilitas sistem politik yang bersifat distributif merupakan kemampuan suatu sistem politik untuk mengalokasikan atau mendistribusikan sumber-sumber material dan jasa-jasa kepada individu ataupun kelompok yang ada dalam masyarakat. Sumber-sumber yang didistribusikan meliputi berbagai jenis barang, jasa, kehormatan, status, dan kesempatan untuk memperolehnya. Semakin banyak bidang yang tersentuh oleh kemampuan distribusi dari sistem politik maka dikatakan kemampuan distributif sebuah sistem politik semakin baik.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah berkaitan dengan pemerataan distribusi, kecepatan distribusi, dan penguasaan atas distribusinya. Tidak hanya terhadap hal-hal ini, permasalahan distributif pun dapat muncul dari persoalan pemaknaan terhadap hal-hal yang mestinya didistribusikan dan ke mana hal-hal itu harus didistribusikan. Pada satu titik, dapat saja sistem politik itu terlihat positif karena mampu menjalankan fungsi distributifnya. Namun di sisi lain, dapat saja terjadi distribusi yang sudah berjalan itu dipandang belum maksimal karena terkait dengan persoalan penggunaan sumber daya ekstraktif dan landasan regulatif yang tidak diterapkan dan dijalankan secara maksimal pada sistem politik itu.

Kapabilitas sistem politik yang bersifat simbolik terkait dengan kemampuan sistem politik untuk mengalirkan simbol-simbol dari suatu sistem politik ke dalam lingkungannya maupun keluar dari lingkungannya. Simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politik meliputi nilai yang dianut oleh para pemimpin, hari-hari besar nasional, upacara kemiliteran dan berbagai acara simbolik lainnya. Ketika sistem politik kurang dipercaya ataupun menurun kredibilitasnya, salah satu indikator yang bisa dilihat adalah dirusaknya

patung-patung ataupun simbol-simbol lain yang sarat dengan nilai-nilai politis. Dalam hal kapabilitas simbolik ini, persoalan yang biasa muncul adalah dominasi penguasa atau pemerintah saat menentukan simbol-simbol yang dikomunikasikannya kepada publik. Kecenderungan yang biasa terjadi adalah kapabilitas simbolik ini dilakukan secara maksimal sehingga masyarakat dan institusi lain tidak memiliki ruang dan wewenang untuk menyertakan simbolsimbolnya ini. Kecenderungan dominasi penguasa untuk mewacanakan imbol-simbol ini kiranya dapat dengan mudah ditemui dalam sistem otoritarian dan sistem komunis.

Dalam sistem libertarian, kapabilitas simbolik suatu sistem politik cenderung ditentukan oleh kemampuan dalam melakukan tawar-menawar kekuatan untuk menghadirkan simbol-simbol itu. Kapabilitas sistem politik yang bersifat responsif adalah kemampuan sistem politik untuk menanggapi tuntutan-tuntutan, tekanan-tekanan atau dukungan-dukungan yang berasal dari lingkungan dalam maupun luar. Sistem politik yang secara cepat dan dinamis menanggapi tuntutan yang berasal dari lingkungannya dapat dikatakan memiliki kemampuan responsif yang tinggi.

Sebaliknya, sistem politik yang tak cepat menanggapi tuntutan dari lingkungannya dikatakan sistem politik yang tak responsif. Persoalannya tentu tak sekadar pada kecepatan suatu sistem politik dalam memberi respons atas berbagai tuntutan yang ada. Selain masalah kecepatan itu sendiri, hal lain dalam kapabilitas *responsive* yang perlu diperhatikan adalah pada kualitas respons yang diberikan dan sejauh mana respons tersebut dapat diterima oleh berbagai pihak, termasuk oleh pihak yang sebenarnya tidak terkait langsung dengan tuntutan yang berkembang. Dalam hal kapabilitas responsif ini pula kerap sekali pihak yang diberi mandat atau sudah memiliki mandat untuk merespons berbagai tuntutan ikut dipersoalkan.

Kapabilitas sistem politik yang bersifat domestik dan internasional adalah kemampuan sistem politik dalam memperlihatkan keberadaannya

secara domestik ataupun internasional. Berkaitan dengan kemampuan domestik, sistem politik yang mampu melakukan penetrasi pada sistem politik yang lain dikatakan memiliki kemampuan regulatif yang baik. Kemampuan responsif internasional dapat dilihat dari berbagai kebijakan dan politik luar negeri sebuah negara. Kapabilitas semacam ini pada dasarnya dapat dipakai untuk melihat eksistensi suatu negara atau bangsa dengan sistem politiknya, yang dapat diterima secara domestik maupun dalam percaturan antarbangsa.

Persoalan ke depan dalam kaitannya dengan kapabilitas domestik dan internasional ini adalah pada kesiapan bangsa atau negara yang menjalankan sistem politik itu untuk meningkatkan daya saingnya. Pemikiran tentang masa depan ini diperlukan karena kondisi sekarang dengan berbagai tantangannya tentu berbeda dengan kondisi pada masa lalu dan akan berbeda pula dengan situasi di masa mendatang.

Keterlenaan pada kapabilitas domestik dan internasional masa lalu dan masa sekarang, bukan tidak mungkin akan menyebabkan suatu negara hilang eksistensinya di masa depan. Kasus pecahnya Uni Soviet dan terpecahnya beberapa negara Eropa Timur dapat dijadikan contoh untuk mempermudah pemahaman tentang suatu negara yang memikirkan peluang daya saingnya di masa mendatang jika kapabilitas domestik dan internasionalnya ingin tetap terakui.

Implementasi dari bentuk demokrasi di dalam sebuah negara adalah adanya pemilihan umum untuk memilih kepala negara maupun kepala pemerintahan, berikut pemilihan anggota legislatif. Proses dalam penyelenggaran pemilihan umum merupakan kegiatan yang dianggap efektif untuk memilih pejabat-pejabat di pemerintahan sebagai bentuk bagian yang tidak terpisahkan dalam demokrasi, di negara-negara eropa pun proses ini yang dilakukan dalam pemilihan pejabat publik.

Struktur umum yang dimiliki oleh sistem politik adalah kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, badan legislatif, eksekutif, birokrasi, dan badan peradilan. Kelemahan klasifikasi ini adalah tidak terlalu membantu dalam memperbandingkan suatu sistem politik dengan sistem politik yang lain. Misalnya, kita akan membandingkan antara Indonesia dengan Inggris, keduanya memiliki keenam jenis struktur atau lembaga politik tersebut. Hanya saja struktur tersebut tidak sepenuhnya sama. Kedua negara ini memiliki legislatif, di Inggris dengan dua kamar, *House of Common dan House of Lord*, sedangkan di di Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Indonesia menggunakan sistem presidensil, sedangkan Inggris menggunakan sistem parlementer. Inggris dengan dua partai dan Indonesia dengan multipartai. Dari perbandingan tersebut secara singkat mungkin dapat dilihat perbedaan yang ada. Namun, persamaan dan perbedaan yang penting tidak akan dapat dilihat dari perbandingan tersebut. Hanya dengan melihat peran yang dijalankan dari lembaga-lembaga tersebut dalam pola bekerjanya suatu sistem yang lebih luas, baru kita dapat melihat persamaan dan perbedaan yang muncul. Misalnya, untuk dapat mengetahui perkembangan dari jumlah partai politik dari kedua negara tersebut maka kita dapat menelusurinya dari sistem kepartaian, sistem Pemilu, sampai dengan sejarah terbentuknya partai politik dari kedua negara tersebut. Dengan cara tersebut kita akan mengerti perbedaan dan persamaan yang ada. Kita dapat melihat peran apa saja yang dimainkannya oleh lembaga-lembaga tersebut dalam pola bekerjanya sistem yang lebih luas. Dari perbandingan inilah kita akan temukan persamaan dan perbedaan yang penting tersebut.

Menurut Almond suatu analisis struktur menunjukkan jumlah partai politik, dewan yang terdapat dalam parlemen, sistem pemerintahan terpusat atau federal, bagaimana eksekutif, legislatif, dan yudikatif diorganisir serta secara formal dihubungkan satu dengan yang lain. Adapun analisis fungsional

menunjukkan bagaimana lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi tersebut berinteraksi untuk menghasilkan dan melaksanakan suatu kebijakan. Menurut Almond sistem politik menjalankan fungsi sosial politik, rekruitmen, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengaturan kebijakan, yang kesemuanya itu dijalankan dengan komunikasi politik. Komunikasi politik bukanlah hal yang berdiri sendiri, akan tetapi proses penyampaian pesan pada saat fungsi yang lain berjalan. Hal ini berarti bahwa komunikasi politik berjalan inherent dalam setiap sistem politik.

Penerapan kebijakan pemerintah, output, mempengaruhi kehidupan ekonomi, struktur sosial, dan kebudayaan dari masyarakat domestik. Pengaruh terhadap masyarakat ini selanjutnya mempengaruhi tuntutan-tuntutan berikutnya yang diajukan dalam sistem politik, dan bisa meningkatkan maupun menurunkan tingkat kesetiaan politik pada masyarakat. Dengan demikian, konsep fungsional akan dapat menggambarkan kegiatan-kegiatan dan proses yang berlangsung dalam setiap masyarakat tanpa memandang struktur-struktur dari sistem politiknya ataupun kebijakan umum yang ditempuhnya. Dengan memahami fungsi-fungsi ini maka kita akan dapat membandingkan dari beberapa sistem politik. Misalnya, kita bandingkan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Untuk membandingkan kedua negara tersebut kita dapat melihat struktur politik yang ada, dan bagaimana struktur politik tersebut dapat menjalankan fungsi politiknya masing-masing. Dengan perbandingan ini kita akan dapat melihat bahwa penyebaran fungsi politik lebih merata di Amerika Serikat.

Di Amerika Serikat, setiap struktur atau lembaga politik menjalankan fungsi politik minimal satu. Sedangkan di Uni Soviet, ada satu atau dua struktur (partai dan birokrasi) yang menjalankan semua fungsi politik dan ada struktur yang hampir tidak berfungsi sama sekali. Kita dapat melihat, misalnya fungsi dari organisasi atau kelompok kepentingan yang ada di Uni Soviet, hanya menjalankan fungsi sosialisasi politik. Kelompok tersebut tidak dapat

menjalankan fungsi rekruitmen atau komunikasi politik. Hal lain misalnya kita dapat melihat bahwa parlemen di Amerika Serikat lebih fungsional daripada di Uni Soviet. Easton juga memandang bahwa sistem politik tidak dapat lepas dari konteksnya. Sebab itu pengamatan atas suatu sistem politik harus mempertimbangkan pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini disistematisasikan dalam dua jenis data, psikologis dan situasional. Kendatipun masih abstrak, Easton sudah mengantisipasi pentingnya data pada level individu. Namun, level ini lebih dimaksudkan pada tingkatan unit-unit sosial dalam masyarakat daripada perilaku warga negara (seperti umum dalam pendekatan behavioralisme).

Easton menekankan pada motif politik saat suatu entitas masyarakat melakukan kegiatan dalam sistem politik. Hal yang menarik dari Easton, yaitu antisipasinya atas pengaruh lingkungan anorganik, seperti lokasi geografis ataupun topografi wilayah yang ia anggap mempunyai pengaruh tersendiri atas sistem politik, selain tentunya lingkungan sistem sosial (masyarakat) di dalam ataupun luar sistem politik. Easton juga menghendaki dilihatnya penempatan nilai dalam kondisi *disequilibriun* (ketidakseimbangan). Ketidakseimbangan inilah yang merupakan bahan bakar sehingga sistem politik dapat selalu bekerja. Dengan keempat asumsi di atas, Easton ingin membangun penjelasan atas sistem politik yang tahapan-tahapannya jelas. Pertanyaan dasar kerangka pikir ini adalah konsep-konsep apa saja yang harus dikaji dalam upaya menjelaskan fenomena sistem politik, lembaga-lembaga apa saja yang memang memiliki kewenangan untuk pengalokasian nilai di tengah masyarakat.

Banyak faktor yang dapat memengaruhi sistem politik Indonesia, di antaranya faktor lingkungan, sosial budaya, dan kondisi ekonomi suatu negara. Pengaruh tersebut membentuk perilaku politik dalam masyarakat dan negara, baik pemegang kekuasaan maupun yang dikuasai dan dikendalikan oleh kekuasaan yang ada. Oleh karena itu, David Easton mengatakan bahwa sistem

politik adalah kehidupan politik yang merupakan sistem interaksi yang ditentukan oleh fakta yang berhubungan dengan penyebaran nilai-nilai secara otoritatif dalam masyarakat.

Menurut Rusadi, sifat negara Indonesia mengandung unsur falsafah, gagasan, cita-cita, nilai-nilai, doktrin, atau wawasan yang melekat pada Indonesia. Oleh karena itu, sistem politik Indonesia merupakan sistem khas atau politik yang bersifat keindonesiaan yang diwarnai oleh nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 1945, nilai-nilai proklamasi, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem politik di Indonesia dapat diinterpretasikan, baik sebagai seluruh proses sejarah dari saat berdirinya negara Indonesia sampai dewasa ini maupun hanya dalam periode tertentu dari proses perjalanan sejarah.

Selama masa Orde Baru negara sangat kuat. Tidak ada perubahan yang tidak dimulai dari negara. Masyarakat tidak memiliki ruang partisipasi politik. Masyarakat dimobilisasi oleh negara. Partisipasi bukan bermakna turut serta merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan pembangunan. Partisipasi berubah makna menjadi turut serta memberikan sumbangan dari proyek pemerintah yang dibiayanya kurang. Negara menjadi sangat kuat di mata masyarakat karena negara mengorganisasikan masyarakat yang memiliki beragam kepentingan secara korporatis. Dengan diorganisasikan secara korporatis, masyarakat yang plural dapat menyalurkan kepentingan yang berbeda-beda melalui mekanisme yang tidak perlu menimbulkan konflik antarkelompok atau antarkelas.

Perbedaan kepentingan kelompok dan kelas dapat diselesaikan melalui wakil-wakil mereka dalam organisasi korporatis. Dengan demikian, korporatis merupakan usaha nyata untuk menekan konflik kelas atau kelompok kepentingan dengan baik tidak menggunakan kekerasan. Melalui pengorganisasi secara korporatis inilah negara menaklukkan masyarakat sendiri. Negara dengan mudah memenuhi berbagai kepentingannya yang

otonom, kepentingan eksklusif negara yang tidak mencerminkan aspirasi dan tuntutan masyarakat.

Sebagai implikasinya, masyarakat mengalami depolitasasi. Masyarakat yang tersingkir, tereksploitasi, tidak kuasa melawan tekanan-tekanan negara. Masyarakat yang miskin, seperti kaum buruh, petani, nelayan, pegawai rendahan, dan yang tersisihkan lainnya tidak cukup memiliki kesadaran politik yang memadai untuk menghadapi intervensi negara. Negaranisasi terjadi hingga pedesaan yang terpencil sekalipun.

D. Fungsi Suprastruktur dan Infrastruktur Politik

1. Fungsi Suprastruktur Politik Fungsi struktur lembaga ini menurut Gabriel meliputi:
   a. *Rule Making* (membuat undang-undang). Fungsi ini dilaksanakan oleh lembaga (Badan Legislatif) yang meliputi DPR, DPRD I, DPRD II, dan DPD. DPD sebagai lembaga yang mewakili aspirasi ini merupakan badan baru yang dibentuk supremasi yang fungsinya berkaitan dengan kegiatan seperti pembuatan RUU tentang keseimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota.
   b. *Rule Application* (melaksanakan undang-undang). Fungsi ini adalah fungsi peraturan perundangan yang telah dibuat badan eksekutif pemerintahan pusat sampai ke pemerintah.
   c. *Rule Adjudication* (mengadili pelaksanaan badan yang memiliki fungsi yang ketiga peradilan yang meliputi Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial serta badan sampai ke daerah, seperti PN, PT.
2. Fungsi Infrastruktur Politik
   a. Pendidikan politik, agar rakyat bermaksimal dalam sistem politiknya.

b. Artikulasi kepentingan adalah lembaga yang berfungsi menyampai Lembaga ini adalah meliputi antara lain, LSM, Ormas, OKP.
c. Agregasi kepentingan adalah lembaga yang berfungsi memadukan aspirasi rakyat yang disampaikan oleh lembaga, seperti LSM, Ormas, OKP Lembaga yang memiliki fungsi adalah lembaga partai politik.
d. Rekrutmen politik adalah lembaga yang berfungsi melakukan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin bagi masyarakat.
e. Komunikasi politik adalah kegiatan yang berguna untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intragolongan, institut, asosiasi, maupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintahan.

Dalam sistem politik, pemerintahan dan birokrasi merupakan struktur politik penting karena menyangkut pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan. Menurut Almond dan Powell, Jr., agenagen pemerintahan meskipun terspesialisasi dalam banyak cara adalah multifungsional. Agen-agen eksekutif membuat kebijakan, memperkuat dan mengambil keputusan-keputusan; agen-agen legislatif berpartisipasi dalam implementasi kebijakan seperti halnya partisipasi yang mereka lakukan dalam membuat kebijakan.

Lembaga pemerintahan didukung oleh para eksekutif politik (*political executive*), yang mempunyai banyak nama dan *title*. Beberapa eksekutif disebut sebagai presiden, tetapi berbeda dalam hal kekuasaan yang mungkin mereka laksanakan dan fungsi-fungsi yang mereka tampilkan. Sementara yang lainnya disebut sebagai perdana menteri. Eksekutif politik juga mempunyai nama kolektif, seperti kabinet, dewan menteri, politbiro atau presidium. Di banyak negara, eksekutif politik ini mempunyai nama-nama yang berbeda, tetapi peran dan fungsinya kurang lebih sama.

BAB IV STRUKTUR SISTEM POLITIK INDONESIA

A. Definisi Struktur Politik

Struktur politik bersumber dari dua kata, yaitu struktur dan politik. Struktur memiliki arti bentuk atau konfigurasi, sedangkan politik memiliki arti skema negara. Berdasarkan arti-arti tersebut, struktur politik secara etimologis berarti bentuk atau konfigurasi yang berkaitan dengan skema negara. Struktur politik merupakan penetapan nilai-nilai diktatorial yang didominasi oleh persebaran dan pelaksanaan kekuasaan.

Unsur pokok dari struktur politik ialah peran masing-masing invidu, yang dimana peran tersebut melahirkan pola perilaku yang beraturan. Struktural fungsional merupakan skema yang digunakan dalam stuktur ketika menyertakan fungsi-fungsi politik. Struktur politik dapat dibagi menjadi sistem, proses, dan aspek politik. Struktur sistem mengacu pada lembaga atau formasi yang memelihara atau memodifikasi struktur politik, pernyataan tersebut disampaikan oleh Almond dan Powell Jr. Secara terperinci struktur tersebut menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Sosialisasi politik memiliki fungsi-fungsi antara lain seperti mensosialisasikan mengenai kehidupan politik dari berbagai pranata kepada generasi muda.
2. Dalam sistem rekrutmen politik, pemimpin-pemimpin politik diusulkan oleh partai politik yang mengusungnya. Ketika proses ini berjalan, komunikasi politik menjadi penghubung bagi keberlangsungan sistem agar bisa berjalan sesuai dengan rencana. Jika komunikasi politik tidak di sertakan, maka diprediksi kekuatan yang berada dalam komponen sistem politik tidak bisa bergerak.

Struktur politik berdasarkan prasarananya dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu struktur politik pada masyarakat, keadaan politik dalam masyarakat, zona politik masyarakat, dan

komoditas politik yang melingkupi bagian pemerintahan, keadaan pemerintahan, dan keadaan politik pada pemerintahan. Struktur politik tersebut dikemukakan oleh Almond dan Coleman.

Struktur politik pada keberlangsungan politik demokratis dapat diurai menjadi dua bagian, antara lain struktur yang bersifat formal dan stuktur yang bersifat informal. Struktur formal diartikan sebagai penggerak politik yang berlaku dalam menangani berbagai masalah. Sedangkan struktur informal diartikan sebagai struktur yang dapat memberikan pengaruh terhadap pola kerja aparatus masyarakat dalam mengutarakan dukungan dan suatu masalah tertentu yang berkaitan dengan khalayak umum.

Dalam menelaah struktur politik pada pemerintah, umumnya akan berlanjut ke pembahasan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan merupakan pola kerja mengenai keterkaitan fungsi antara lembaga pemerintahan yang umumnya disahkan oleh undang-undang. Kategorisasi kekuasaan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial.

B. Struktur Politik Formal

Dalam pandangan trias politica, struktur sistem politik dibagi menjadi tiga kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk merancang undang-undang, kekuasaan eksekutif mengaktualkan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang memiliki kekuatan untuk menyidik penyelewangan undang-undang.

1. Pemerintah dan Birokrasi

   Pemerintah dan birokrasi adalah struktur politik yang penting karena melibatkan pembuatan dan penerapan skema negara. Walaupun

perwakilan-perwakilan pemerintahan umumnya diatur secara khusus, tetapi dalam beberapa waktu bisa menjadi fungsional.

Indonesia mengalami amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Amandemen ini melahirkan beberapa hal penting, khususnya persoalan pengurangan kekuasaan MPR dengan hanya fokus pada urusan UUD . Setelah itu, MPR tidak diwajibkan untuk menentukan presiden dan wakil presiden karena pemilihan tersebut dilakukan langsung oleh rakyat pada setiap lima tahun sekali.

2. Badan Legislatif

Keanggotaan badan legislatif saat ini telah mengalami banyak perubahan, khususnya dalam hal perwakilan partai politik jika dibandingkan dengan era orde baru. Namun pada hakikatnya badan legislatif ini gagal berfungsi secara optimal. Banyak pengamat yang menyatakan bahwa para anggota badan legislatif tersebut lebih mengutamakan kepentingan individu dan partai politik yang diwakilinya daripada mementingkan kepentingan masyarakat umum.

Jika dibandingkan dengan era orde baru, saat ini DPR sudah mengalami perkembangan dalam hal menjamin kebebasan satu cabang kekuasaan terhadap kekuasaan yang lainnya, meskipun hasilnya belum memenuhi target yang diharapkan. Sebagian anggota legislatif sudah memiliki keberanian dalam dalam memberikan kritik untuk pemerintah, namun kritik yang mereka sampaikan ujungnya hanya bersifat konsensus karena partai politik yang mereka wakili juga memiliki wakil pada pemerintahan seperti kabinet dan kementrian.

3. Badan Peradilan

Kekuasaan tertinggi kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, dan terdapat lembaga peradilan yang ada di bawahnya. Mahkamah Konstitusi berwenang memberi peradilan di tingkat pertama dan terakhir, serta ketetapannya bersifat konklusif, mengingat inkonstitusionalitas dan atas kekuasaan lembaga negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar.

Selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi juga ada Komisi Yudisisial. Komisi Yudisial pada hakikatnya bersifat independen yang memiliki kekuasaan untuk menyarankan pelantikan hakim agung serta memiliki kekuasaan dalam hal yang berkaitan dengan kehormatan, martabat, dan perlindungan terhadap perbuatan hakim.

C. Struktur Politik Informal

1. Partai Politik

Saat ini partai politik sudah menjadi simbol penting dalam politik modern, baik secara demokratis ataupun otoriter, dan bahkan merupakan bagian integral dari sistem politik. Stabilitas partai, sistem dan keberpihakan sangat tergantung pada susunan kelembagaan dan implikasinya. Implikasi yang meluas ditambah dengan rendahnya institusionalisasi partai politik menyebabkan politik menjadi kacau dan penuh kekerasan, hal ini disampaikan oleh Huntington.

Partai politik dalam sebuah sistem politik demokrasi pada umumnya melakukan beberapa fungsi berikut.

a. Alat komunikasi politik. Partai politik mempunyai banyak tugas, salah satunya yaitu mengawal berbagai suara yang disampaikan oleh masyarakat. Partai politik perlu memenuhi tuntutan masyarakat dan membawanya ke dalam sistem politik

melalui konsolidasi dan klarifikasi kepentingan. Sementara itu, partai politik juga membahas dan menyebarluaskan banyak kebijakan yang diatur oleh pemerintah.

b. Alat sosialisasi politik. Partai politik adalah golongan terorganisir yang anggotanya memiliki arah, rancangan, dan ambisi yang sama, hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan kekuatan politik dan mengambil posisi politik untuk melaksanakan kebijakan mereka. Oleh karena itu, terbentuklah program kerja yang merupakan implementasi dari ideologi dan cita-cita sebuah partai politik. Program kerja ini umumnya tersedia untuk membantu mereka dalam pemilihan umum. Dalam hal ini, partai politik mendukung sistem politik dengan mensosialisasikan dan mendidik anggotanya untuk mengenali kepentingannya sendiri dan kepentingan nasional serta menjadi orang yang bertanggung jawab.

c. Alat rekrutmen politik. Rekrutmen dilakukan terhadap pemimpin politik yang dapat mempertahankan kekuasaan yang dicapai. Hal tersebut bertujuan agar partai politik mendapatkan kekuasaan.

d. Alat manajemen konflik. Partai politik memiliki peran dalam memperantarai konflik dalam masyarakat dan kemudian dimanifestasikan ke dalam sistem politik. Stabilitas suatu partai politik sangat memegang peran penting dalam menetapkan tingkat lembaga dan implikasi. Suatu sistem partai yang kuat dan memiliki kapabilitas akan melakukan dua hal penting, yaitu:

    1) Memulai peningkatan partisipasi politik melalui saluran partai dan mengelola atau mengarahkan kembali semua anomi dan aktivitas politik revolusioner;

2) Membimbing peran serta beberapa anggota yang baru dihimpun dalam rangka mengurangi tekanan yang hadir pada sistem politik. Partai politik menyiapkan proses yang mapan dan terlembagakan untuk memadukan kelompok-kelompok yang baru ke dalam sebuah sistem politik, pendapat tersebut disampaikan oleh Huntington. Jika pemilu dan parlemen adalah instrumen perwakilan, maka partai adalah instrumen mobilisasi.

Selama era orde baru, perkembangan partai politik mengalami pembatasan, hal ini terjadi karena imbas ketidakstabilan yang berkepanjangan pada saat demokrasi parlementer di awal 1950-an. Partai politik dinilai sebagai suatu masalah pada saat itu, sehingga kemampuan manuver mereka terbatas dan keberadaan mereka dimaksudkan hanya sebagai alat untuk membenarkan pemerintahan Soeharto yang dominan. Dalam keadaan seperti demikian, partai politik hanya dapat berfungsi sebagai sarana mobilisasi massa, terutama pada pemilihan parlemen.

Pada masa reformasi di tahun 1999, terdapat 141 partai politik yang terdaftar pada Departemen Kehakiman. Saat itu masyarakat memiliki kesempatan untuk membentuk partai politik dengan pemikiran yang bermacam-macam. Namun tidak semua partai politik bisa mengikuti pemilu. Akibat adanya undang-undang pemilu, setiap tahunnya jumlah partai politik yang bisa mengikuti pemilu mengalami pengurangan.

Banyak pengamat yang setuju dengan fakta bahwa partai-partai politik yang muncul sejak dimulainya reformasi cenderung tidak menjalankan tugas politiknya dengan baik. Memang, partai politik seringkali lebih diarahkan pada perebutan kekuasaan daripada kinerja fungsi politik mereka. Bahkan, partai politik dituding sangat berperan

dalam menciptakan amnesia politik akibat kekerasan masa lalu, dengan alasan sebagai berikut.

a. Dalam setiap badan partai politik, menjalar semangat dengan tujuan praktis dan paham yang hendak meraup keuntungan personal belaka. Terlebih lagi, kedua hal tersebut telah jatuh ke jajran elite individu. Situasi tersebut mengakibatkan solidaritas hanya dianggap dalam arti yang lebih sempit, khususnya hanya sebagai hubungan kepentingan daripada untuk alasan yang lebih luas. Indikasi tersebut tercermin dari menjamurnya koalisi partai-partai dengan ideologi yang berbeda bahkan bertentangan di masa lalu.
b. Masih ada kesalahpahaman bahwa partai adalah kesatuan rakyat dari semua kepentingan dan kepentingan elite kelas penguasa adalah mutlak. Masalah hadir ketika kepentingan elite lebih diutamakan daripada kepentingan publik.
c. Partai politik tidak memiliki soliditas ideologis. Partai politik yang kurang menumbuhkan paham ideologi pada para eksekutifnya mengakibatkan kumpulan tujuan politik tidak memiliki landasan yang jelas.
d. Partai politik hanya berhasrat pada perebutan otoritas selama lima tahun dalam tujuan jangka pendek.
e. Banyak pihak tidak proporsional dengan kemampuan mereka untuk mengumpulkan dan mengklarifikasi kepentingan publik, yang juga sangat multidimensi.

2. Struktur Politik Informal Non Partai Politik

Saat stuktur politik formal menghadapi stagnasi dan tidak berhasil menjalankan fungsi yang dimaksudkan, maka politik informal berperan besar dalam menyelaraskan tujuan dan memberikan

kontribusi yang bernilai untuk sistem politik. Struktur politik informal tersebut seperti halnya media massa, organisasi non pemerintah, kelompok agama, asosiasi aliansi profesi, dan lain-lain.

Komunitas Lembaga Swadaya Masyarakat atau biasa disebut dengan *Non-Governmental Organization*/ *Civil Society Organization* menjadi salah satu yang harus diperhatikan di era reformasi. Di era Orde Baru, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan salah satu vitalitas sosial utama yang mengkritik pemerintah saat kekuatan lain di masyarakat diama akibat penumpasan brutal terhadap pemerintah Orde Baru.

Pada masa reformasi, LSM tersebut secara aktif terlibat dalam mempengaruhi kebijakan publik di bidang dimana mereka terlibat. LSM ini menjalar di masyarakat dengan berbagai kepentingan. Kepentingan tersebut diantaranya memperhatikan bagian demokrasi, keuniversalan, pemerintahan yang baik, penguatan konsumen, isu lingkungan, media, dan banyak lagi. LSM juga melakukan lobi politik dengan DPR dan juga pemerintah agar tujuan mereka terlindungi dan bisa dicapai dengan melalui proses sistem politik.

LSM memiliki kekuatan politik yang semakin substansial ketika mereka menjalin hubungan internasional. Mereka biasanya didanai oleh organisasi donor internasional, banyak di antaranya bahkan dapat memobilisasi pandangan masyarakat pada tingkat lokal, nasional, serta internasional. Dengan hadirnya kelompok LSM ini diharapkan bisa meningkatkan peran masyarakat dalam skala yang lebih besar pada proses asifikasi, penerapan, dan analisis setiap kebijakan yang diedarkan oleh pemerintah.

Sistem pendemokrasian mengakibatkan organisasi-organisasi tersebut berani menuntuk haknya. Contohnya saja Persatuan Guru

Republik Indonesia (PGRI) yang menyatakan hak-hak guru sebagai salah satu organisasi keguruan yang telah ada semenjak pemerintahan Orde Baru. Mereka tidak segan memboikot dengan cara berhenti mengajar saat kebijakan yang diberikan pemerintah terkesan merugikan kepentingan mereka.

Pernyataan di atas menandakan bahwa sebagian besar lembaga politik informal sudah memiliki kiprah krusial pada sistem politik demokrasi. Pihak lembaga ikut serta pada proses interpretasi dan konsolidasi kepentingan yang menjadi komponen krusial dalam sistem politik. Namun, sangat disayangkan, kurangnya rasa tanggung jawab terhadap sistem politik mengakibatkan mereka melakukan sikap anarkis.

D. Pendekatan Dalam Sistem Politik

Sistem politik adalah seperangkat fungsi atau peran dalam struktur politik yang mewakili proses jangka panjang (model keberlanjutan). Proses mengandung dimensi waktu (masa lalu, sekarang dan masa depan). Dari perspektif ini dapat dilihat bahwa sistem politik merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, yaitu sistem sosial.

Menurut Almond dan Powell, pendekatan dan pemahaman sistem politik dapat dibagi menjadi tiga bagian:

1. Pendekatan Konservatif (Tradisional)

   Pendekatan konservatif adalah pendekatan sistem politik yang menganggap bahwa lembaga negara, kekuasaan, dan kepercayaan politik sebagai validitas untuk menganalisis sistem politik. Tokoh dari pendekatan ini adalah Leo Strauss dan John Halowell. Tokoh ini bertentangan dengan pendekatan aktivis (perilaku). Alasannya adalah bahwa terlalu jauh dari nilai untuk menjawab pertanyaan, "Apa sistem politik atau masyarakat yang terbaik untuk dihadapi?". Tokoh tersebut

juga berpandangan bahwa pendekatan behavioris (perilaku) tidak relevan dengan politik praktis dan mengabaikan isu-isu sosial yang ada. Pendekatan ini memiliki anggapan sebagai berikut:

a. Bentuk analogi sistem politik mempunyai sifat sempit, yang biasanya mengarah pada pengaruh teori hukum, pemikiran, dan lembaga negara.
b. Fokus pada penataan institusi, otoritas, dan kepercayaan politik.
c. Dipandu oleh nilai dan norma, serta tradisi populer (praktis dan dogmatis) di masyarakat.
d. Merujuk pada filosofi (seharusnya).
e. Merujuk pada ilmu terapan (penggunaan praktis).
f. Konsep pemikirannya kebanyakan dipengaruhi oleh konsep hukum dan sejarah (*law and history*).
g. Lebih banyak analisis berkaitan dengan metode kualitatif.

2. Pendekatan Perilaku (*Behavior Approach*)

Pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh *Behavioral Analysis System*. Dalam arti, unit analisis lebih bergantung pada pernyataan, tingkah laku individu, organisasi, dan lembaga pemerintah yang saat ini beroperasi.

Pendekatan ini didasarkan pada teori sistem. Artinya, memperhitungkan realitas (termasuk realitas lingkungan). Pengaruh intelektual seperti Max Weber dan Talcott Parsons telah menciptakan pendekatan baru untuk memaparkan, menjelaskan dan menetapkan fenomena politik yang berbeda berdasarkan struktur ilmiah dan pengetahuan yang teratur.

Pendekatan baru itu disebut pendekatan perilaku dan alirannya disebut sebagai aliran keperilakuan. Menurut Morton R. Davis, perkembangan skema behavioral ini sejalan dengan pendekatan

struktural dan fungsional serta pendekatan analisis sistem, sehingga ada beberapa perbedaan, namun ketiganya sering disamakan. Sejarah dan prinsip pendekatan ini adalah sebagai berikut:

a. Berkembang setelah perang (1950-an);
b. Salah satu gerakan pembaruan pada ilmu politik;
c. Metode analisis dalam pendekatan ini adalah analisis struktural dan fungsional (G.A. Almond). Artinya, pendekatan ini berurusan dengan struktur dan fungsi lembaga pemerintahan dan sosial dan berhadapan dengan realitas disertai dengan fakta;
d. Fokus pada "analisis perilaku politik" dan "tidak didasarkan pada institusi politik, kekuasaan dan kepercayaan";
e. Berdasarkan peristiwa umum dalam masyarakat (struktur dan fungsi);
f. Merujuk pada penelitian yang bersifat empiris;
g. Merujuk pada ilmu murni (teoritis);
h. Konsep ideologis kebanyakan dipengaruhi dengan konsep sosiologis dan psikologis;
i. Metode kuantitatif kebanyakan dipakai dalam menganalisis;
j. Memiliki arah kajian yang lebih merata, yaitu mengulas struktur dan fungsi pada penyusunan kebijaksanaan.

3. Pendekatan Pascatindakan (*Post-Behavioralis*)

   Pendekatan ini menganggap bahwa manusia itu kreatif. Selain itu, menurut Miriam Budiardjo, perilaku, struktural, fungsional dan sistem dalam mengejar basis pengetahuan empiris tanpa terlalu memperhatikan visi dan imajinasi diperlukan untuk memecahkan masalah sosial-politik serius yang perlu segera mendapat perhatian pendekatan analitis.

Pendekatan pascatindakan ini muncul sebagai reaksi terhadap aliran tindakan (*behavioralism*). Sebab, menurut *post-behavioral*, aliran behavioral seringkali melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip utama pendekatan pasca tindakan (*behavioralism*) ini adalah:

a. Inti dari pendekatan ini adalah produktif, proaktif, imajinatif, dan kejelian;
b. Mengubah metode pengajaran dan penelitian ilmu politik menjadi metode ilmiah dan kuantitatif yang murni (tepat);
c. Memprioritaskan penelitian korelatif daripada kerja keras;
d. Ilmu politik juga merasa berkewajiban untuk ikut serta dalam upaya mengatasi krisis kemanusiaan, karena ingin mempertahankan kontak dengan realitas sosial;
e. Memprioritaskan nilai dalam inti penelitian ilmu politik.

E. Kapasitas Sistem Politik

Sistem politik harus selalu mampu menghadapi realitas dan tantangannya. Kemampuan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah kemampuan sistem politik dalam lingkup ekstraktif, distributif, regulasi, simbolik, responsif, dan dalam negeri serta internasional untuk mencapai tujuan nasional. Kapasitas sistematis adalah kemampuan sistem untuk mengatasi kenyataan dan tantangan.

Ilmuwan politik memiliki pandangan yang berbeda tentang keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini. Ilmuwan politik klasik seperti Aristoteles dan Plato, diikuti oleh ahli teori liberal abad ke-18 dan 19, menganggap keberhasilan politik diukur dari sudut pandang moral. Saat ini, pembuat kebijakan melihatnya dari tingkat kinerja, sejauh mana lingkungan mempengaruhi masyarakat, dari lingkungan luar, dan dari lingkungan internasional. Efek ini akan membawa perubahan politik. Subjek perubahan

politik dapat berasal dari elite politik atau kelompok prasarana politik dan wilayah internasional.

Macam-macam Kapasitas Sistem Politik

1. *Extractability capacity*, yaitu kekuatan sistem politik dalam memanfaatkan kesediaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Masalah kapasitas ini juga serupa dengan masalah pada sistem politik liberal. Ekstraktif adalah kemampuan pemerintah untuk mengolah sumber daya alam dan manusia di lingkungan internal dan eksternal. Ekstraktif adalah kemampuan pemerintah untuk mengolah sumber daya alam dan manusia di lingkungan internal dan eksternal.

   Kapasitas ekstraktif adalah kemampuan untuk memobilisasi serta mengelola SDA dan SDM dalam lingkungan nasional maupun internasional. Kapasitas sumber daya alam biasanya potensial sampai dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah. Misalnya, mengelola industri pertambangan dalam menghadapi modal dalam dan luar negeri serta untuk kesejahteraan rakyat. Kemampuan mengelola sumber daya manusia dikaitkan dengan masalah pendidikan, pertumbuhan sumber daya, alokasi sumber daya manusia, dan lain-lain. Kedua aspek kemampuan mengelola potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia itu harus dipadukan untuk satu tujuan yaitu kepentingan negara tempat sistem politik bekerja.

   Dalam situasi saat ini, kapasitas ekstraktif sistem politik dalam mengelola sumber daya material belum bisa mengolah SDA untuk kepentingan penduduknya. Meskipun eksplorasi dan bahkan eksploitasi terjadi di mana-mana, orang masih berjuang dengan kesengsaraan dan kemiskinan ekstrim. Eksploitasi ini juga berdampak pada pemanfaatan SDM yang ada, namun masih banyak pekerja

berkeahlian tinggi yang tidak digunakan dalam peraturan pemerintah karena proses rekrutmen yang tidak profesional atau bahkan terlalu emosional.

2. Distributabilitas, yaitu kemampuan sistem politik untuk mengelola dan mengalokasikan barang, jasa, kesempatan kerja, serta alam dan sumber daya manusia dalam bentuk kehormatan, merupakan hasil sebenarnya dari sistem politik. Ukuran efisiensi ini adalah jumlah dan jenis arti barang yang didistribusikan.

   Kedudukan, kehormatan, keberanian pula adalah benda-benda tak berbentuk yang disalurkan berdasarkan pola sistem manajemen sumber daya manusia yang dipercaya oleh sistem politik yang berkaitan. Kapasitas distributif merupakan kemampuan yang dimiliki pemerintah menyalurkan untuk mendistribusikan sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam bentuk barang ataupun jasa yang dimiliki oleh negara dan masyarakat.

   Kapasitas distribusi mengacu pada kemampuan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya ekonomi, penghormatan, posisi, dan peluang ke seluruh tingkatan masyarakat. Sumber daya alam yang dimiliki oleh negara dan masyarakat diproses untuk disalurkan secara adil dalam rangka menciptakan keadilan sosial. Disaat yang bersamaan, kapasitas distribusi ini memperjelas distribusi mata pencaharian dan sumber pendapatan, serta mobilitas sosial. Demikian jug dengan pajak pendapatan negara harus didistribusikan kembali oleh pemerintah pusat menuju pemerintah daerah.

   Dalam konteks saat ini, kapasitas distribusi terkait dengan pengalokasian barang dan jasa, kapasitas distribusi barang dan jasa sistem politik dinilai belum maksimal karena masih terdapat

kesenjangan antara masyarakat di kota dengan masyarakat di desa. Banyak ditemukan kesenjangan distribusi barang ataupun jasa antara daerah yang aksesnya mudah untuk dijangkau dan daerah yang aksesnya sulit dijangkau.

Selain itu, pejabat politik Indonesia belum siap untuk memberikan kehormatan kepada pihak lain dalam hal kehormatan, status, dan alokasi kesempatan, sehingga hanya muncul oligarki kekuasaan, yang juga memiliki sistem dinasti dalam politik. Selain itu, sistem politik masih menciptakan lapangan kerja yang minim dan menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi.

3. Kapasitas regulasi, yaitu kemampuan sistem politik untuk mengembangkan peraturan perundang-undangan untuk pengawasan, pengaturan, dan penge- lolaan. Regulasi adalah kebijakan negara dalam meninjau dan mengendalikan tingkah laku personal maupun kelompok agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Regulasi mengacu pada aliran kontrol atas tingkah laku personal dan hubungan kelompok dalam suatu sistem politik. Regulasi diperlukan untuk memantau perilaku personal dan kelompok, dan negara memainkan peran penting dalam mengatur dan memastikan hak-hak personal dan kelompok, pendapat tersebut disampaikan oleh Gabriel Almond.

   Dalam situasi saat ini, kapasitas regulasi merupakan kapasitas yang sangat penting di negara ini. Kenapa tidak? Regulasi hadir sebagai peninjau dan pengatur perilaku dalam jalannya sistem politik. Ironisnya, regulator justru menentang regulasi yang dibuatnya bahkan cenderung “memberdayakan” dirinya dengan regulasi yang dibuatnya. Misalnya, anggota DPR sering melanggar hal ini.

4. Kapasitas simbolik, yaitu kemampuan membentuk citra seorang pemimpin negara dan juga kebanggaan kepada negaranya.

kemampuan simbolik berarti kemampuan pemerintah untuk kreatif dan selektif dalam mengembangkan kebijakan yang diterima masyarakat. Ketika kebijakan tersebut diterima oleh masyarakat, maka akan semakin baik kapasitas simbolik sistem politiknya.

5. Kapasitas responsif, yaitu kemampuan pemerintah dalam merespon tuntutan dan tekanan. Gabriel Almond membahas reaktivitas hubungan antara input dan output dalam proses politik. Output berarti kebijakan dari pemerintah yang bisa dihitung sejauh mana kebijakan itu dikontrol oleh indikasi atau adanya keterlibatan masyarakat (sebagai input).

   Kapasitas ini memiliki sedikit perbedaan dengan kapasitas simbolik, namun yang terpenting bukan mencari benang merah antara tuntutan atau kualifikasi politik dan masyarakat, melainkan melembagakan proses penyusunan kebijakan itu sendiri, yaitu melalui mekanisme agregasi dan klarifikasi politik ke dalam kebijakan politik. Oleh karena itu, bukan hanya pertanyaan apakah hasil politik sejalan dengan aspirasi atau kebutuhan masyarakat, tetapi apakah sistem politik dapat melembagakan mekanisme yang memudahkan dan memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam tahap pengembangan kebijakan.

   Dalam situasi saat ini, dari sudut pandang responsif, sistem politik tidak memperhitungkan kepentingan semua masyarakat terhadap sistem politik itu sendiri. Selama ini tren politik dibuat oleh elite politik, terkadang karena tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Tuntutan masyarakat telah diredam dengan berbagai demo, namun belum sepenuhnya ditanggapi.

6. Kapasitas nasional dan internasional adalah kapasitas pemerintah yang terkait dengan bagaimana mereka berinteraksi di lingkungan

domestik atau asing. Dalam situasi saat ini, kapasitas sistem politik dalam negeri masih lemah, sehingga hubungan antara pemerintah dan masyarakat tidak harmonis. Hal ini dibuktikan dengan berbagai tindakan ketidakpercayaan publik terhadap capaian pemerintah di masa lalu.

Dari sisi kapasitas internasional, sistem politik Indonesia sangat terbuka terhadap politik internasional dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat internasional. Namun ironisnya, sistem politik Indonesia memberikan kebebasan kepada masyarakat internasional untuk berinvestasi dengan mengorbankan rakyatnya sendiri. Contoh nyata yang terjadi sekarang ialah adanya perjanjian mengenai perdagangan bebas yang justru membunuh industri lokal. Dari pembahasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kemampuan sistem politik dalam mengelola kemungkinan-kemungkinan yang ada belum optimal. Akibatnya, Indonesia masih me- ngalami masalah klasik yang belum terpecahkan.

Demikian pula menurut Almond, kapasitas sistem politik terdiri dari kapasitas regulasi, ekstraksi, distribusi, simbolisme, dan respons. Dalam demokrasi, masyarakat demokratis lebih responsif daripada masyarakat non-demokrasi, karena tuntutan pemangku kepentingan mempengaruhi kinerja regulasi, pertambangan, dan kapasitas distribusi.

BAB V KORELASI PARTAI POLITIK DAN PROSES POLITIK INDONESIA

Kehadiran partai politik dalam percaturan politik juga dalam sebuah tatanan masyrakat yang terikat oleh suatu struktur kompleks merupakan sesuatu yang tidak bisa dielakkan lagi, kehadirannya tentu sangat diperlukan, bahkan wajib ada demi terciptanya stabilitas. Keberadaan partai politik diperlukan karena dianggap mempunyai kemampuan untuk menjadi media juga memediasi dan menyalurkan partisipasi politik masyrakat yang kompleks tersebut. Semakin kompleks entitas suatu masyarakat, maka keberadaan partai politik akan semakin dibutuhkan sebagai penyalur aspirasi dan penyalur partisipasi politik masyarakat. Tanpa adanya partai politik, kepentingan dan partisipasi politik rakyat akan kurang tersalurkan.

Secara sederhana partai politik memiliki pengertian suatu kelompok terorganisasi dimana para anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, prinsip, dan cita-cita yang sama. Partai politik memiliki tujuan utama untuk memperoleh kekuasaan politik dan mendapatkan kedudukan politik melalui cara konstitusional guna melancarkan program dan tujuannya. Dalam program tersebut di dalamnya tentu mengandung aspirasi atau suara-suara yang berasal dari masyarakat.

Bagi negara penganut demokrasi, keberadaan partai politik merupakan hal yang harus ada dalam sebuah negara. Sebab partai politik merupakan bagian dari sistem demokrasi itu sendiri. Meskipun tidak memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan publik secara langsung, keberadaan partai politik tidak bisa dikesampingkan. Kegiatan-kegiatan partai politik, baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki peran yang sangat penting karena kehadirannya dapat memengaruhi pemerintah selaku perumus utama kebijakan publik, bahkan pemerintah banyak diisi oleh orang-orang yang berasal dari partai politik. Sebuah negara demokratis membutuhkan adanya partai politik. Partai politik menjadi tulang punggung bagi berjalannya demokrasi di Indonesia, sebab peran penting dalam aneka proses politik di lembaga legislatif, pemerintahan, dan lembaga-lembaga negara lainnya tidak bisa dilepaskan dari partai politik.

Mengingat pentingnya posisi partai politik di Indonesia pada era reformasi ini, kenyataannya berbagai permasalahan negara dewasa ini banyak ditengarai oleh partai politik itu sendiri, partai politik banyak menjadi sebab rusaknya nilai-nilai demokrasi negara. Diperlukan adanya rekonstruksi dari berbagai hal substansi terutama mengenai pemahaman perkembangan dan peran partai politik di era reformasi berdasarkan persepsi masyarakat atas eksistensi partai politik. Partai politik secara internal perlu melakukan penguatan institusionalisasi partai, di sisi lain perlu adanya upaya penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia.

Sebuah negara demokratis membutuhkan adanya partai politik dan suatu proses politik didalamnya. Keberadaan partai politik semakin penting karena demokrasi mensyaratkan wewenang warga untuk memerintah dan menjadi bagian dari hak warga berpartisipasi menentukan kebijakan publik dan pemimpin. Tetapi partai politik dibuat tidak hanya untuk memerintah. Partai politik juga untuk menyalurkan *collective will* atau merepresentasikan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat.

Terkait dengan kebijakan publik, maka ada batasan yang lengkap mengenai partai politik seperti dikemukakan oleh Mark N. Hagopian bahwa, partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk memengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilu. Dalam negara demokrasi konstitusional di Indonesia, keberadaan partai politik adalah suatu kemestian. Kehidupan partai politik hanya bisa terpelihara dalam iklim kondusif.

Perwujudan negara demokrasi antara lain dilakukan melalui pemilihan umum (Pemilu). Dalam konteks Pemilu inilah partai-partai politik berperan terutama menjadi kontestan pemilu. Pembatasan yang sangat ketat terhadap keikutsertaan pemilu hanya disebabkan karena, Pertama, sifat pemerintahan yang otoriter. Kedua, partaiparlai politik yang terlalu banyak sehingga tidak bisa dihindarkan adanya pengetatan terhadap jumlah partai politik yang ideal. Terlepas dari jumlah partai

politik yang ideal secara substansial esensi demokrasi adalah kebebasan. Tanpa kebcbasan tidak ada ruang mendirikan partai politik. Kebebasan itu hanya mungkin terdapat di negara dcmokrasi bukan di negara yang otoriter.

Begitu pentingnya Partai Politik, sehingga diasumsikan bahwa tak ada demokrasi tanpa partai politik, pernyataan ini cukup sering dikemukakan. Ini didasari oleh fakta bahwa institusi partai politik adalah salah satu pilar penting bangunan sistem demokrasi selain institusi pemilu, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga pers yang bebas. Meski begitu pentingnya kedudukan partai politik dalam sistem demokrasi, tetapi tanpa partai politik yang kuat maka tak akan ada demokrasi yang kuat.

Partai politik pada awalnya dibentuk atas dasar keinginan untuk menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang mempunyai visi dan misi yang sama, sehingga pikiran dan orientasi mereka dapat dikonsolidasikan. Berangkat dari hal tersebut, dapat diuraikan bahwa partai politik merupakan kelompok terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita tersebut dalam bentuk program yang akan dilaksanakannya dengan cara konstitusional untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik.

Akses partai politik terhadap masyarakat akan menjadi terbuka manakala demokrasi berada di wang keterbukaan dan kebebasan. Penyerapan terhadap aspirasi masyarakat, dengan demikian hanya mungkin jika keterbukaan dan kebebasan tumbuh dengan baik. Partai politik tidak mungkin menyerap aspirasi masyarakat jika iklim keterbukaan dan kebebasan dikunci krannya. Kran keterbukaan dan kebebasan mestilah terbuka agar partai politik bisa eksis. sehingga penyerapan aspirasi masyarakat dapat dilakukan. Masyarakat sebagai basis partai politik memerlukan komunikasi timbal balik yang satu sama lain saling memerlukan. Partai politik dibentuk oleh masyarakat dan sebaliknya partai politik harlls menyerap aspirasi mayarakat untuk kepentingan semua dimensi pembangunan bangsa dan negara.

Partai politik sebagai wadah dan penyalur bagi masyrakat tentunya memiliki peran yang sangat krusial dalam suatu percaturan atau proses politik yang terjadi dalam roda-roda pemerintahan Indonesia. Maka kita perlu kiranya memahami secara subtansial makna partai politik dalam keterikatannya dengan proses politik di Indonesia agar masyarakat bisa lebih dewasa dalam memainkan peran dalam dunia politik dan lebih bisa memahami nilai-nilai politik yang arif dan berkemajuan.

A. Konsep Dasar Partai Politik

Partai politik memiliki definisi yang sangat konpleks dan tidak sederhana. Mendefinisikan partai politik umumnya bersifat normatif, tidak menggambarkan keadaan sesungguhnya dalam realitas politik. Seiring perjalanan politik dari waktu ke waktu, jawaban mengenai definisi partai politik yang diberikan oleh para ilmuwan politik berbeda-beda dari waktu ke waktu. Tetapi, ada sebuah terminologi umum mengenai partai politik yang berangkat dari sebuah premis bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dan kuat dalam pembentukan dan pelaksanaan keputusan.

Dari beragam dan bervariasinya definisi partai politik, namun beberapa definisi berikut dapat dijadikan sebagai acuan dasar dalam memahami definisi partai politik sebagaimana dikemukakan oleh Edmund Burke dikutip oleh Katz dan Crotty bahwa, “Partai politik adalah sekumpulan orang yang bersatu untuk memperjuangkan kepentingan nasional melalui usaha bersama mereka, berdasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang mereka semua sepakati”. Sedangkan, menurut Giovanni Sartori bahwa, “Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik”.

Dari hadirnya partai politik ini yang penting dipahami adalah meluasnya gagasan bahwa rakyat harus diikutsertakan dalam proses politik maka partai politik telah lahir, dan berkembang menjadi penghubung penting antara rakyat dan pemerintah. Pernyataan itu, serupa dengan yang diungkapkan oleh Alexandra Cole bahwa, "Pembentukan partai politik pada umumnya dikaitkan dengan upaya memperluas kepentingan dan pemerintahan representatif".

Perwujudan atau lambang suatu negara modern ditandai dengan kehadiran partai politik didalamnya. Partai politik merupakan suatu alat yang sangat canggih yang pernah didesain oleh manusia untuk mencapai tujuan-tujuan politik utamanya untuk memperoleh kekuasaan, partai politik merupakan alat yang terbukti ampuh untuk itu. Proses politik modern tanpa kehadiran partai politik dianalogikan sebagai ikan yang berada di luar air, tidak ada kehidupan baginya.

Sebuah definisi klasik mengenai partai politik diajukan oleh Edmund Burke tahun 1839 dalam tulisannya "*Thoughts on the cause of the present discontents*". Burke menyatakan bahwa "*party is a body of men united, for promoting by their joint endeavors the national interest, upon some particular principle upon which they are all agreed*"**,** artinya: "Partai politik adalah lembaga yang terdiri atas orang-orang yang bersatu, untuk mempromosikan kepentingan nasional secara bersama-sama, berdasarkan pada prinsip-prinsip dan hal- hal yang mereka setujui".

Robert Michels memberikan pernyataan bahwa partai politik, sebagai sebuah entitas politik, sebagai sebuah mekanisme, tidak secara otomatis mengindetifikasi dirinya dengan kepentingan para anggotanya juga kelas sosial yang mereka wakili. Partai sengaja dibentuk sebagai alat untuk mengamankan tujuan. Juga menjadi bagian dari tujuan itu sendiri, memiliki tujuan dan kepentingan di dalam dirinya sendiri. Dalam sebuah partai, kepentingan massa pemilih yang telah membentuk partai kerap kali terlupakan oleh sebab

terhalangi oleh kepentingan birokrasi yang dijalankan pemimpin-pemimpinnya.

Selanjutnya, batasan yang lebih lengkap mengenai partai politik seperti telah diuraikan sebelumnya, yaitu dikemukakan oleh Mark N. Hagopian bahwa, "Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk memengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologi tertentu melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan".

Batasan-batasan dalam partai politik dapat dilihat bahwa inti atau basis sosiologis sebuah partai politik adalam ideologi dan kepentingan partai itu sendiri yang ditujukan pada usaha-usaha untuk mendapatkan kekuasaan atau kedudukan. Batasan ini jika diberikan interpretasi, maka dapat dikatakan bahwa ideologi suatu partai politik merupakan aspek terpenting bagi kelangsungan parti politik itu sendiri, setiap partai politik pasti memiliki ideologi yang memiliki fungsi tidak hanya sebagai identitas pemersatu, melainkan juga sebagai tujuan perjuangan terhadap visi besar partai.

Mengenai posisi partai politik dalam sebuah entitas demokrasi, dapat dikatakan bahwa partai politik adalah sebuah organisasi politik yang berada di luar struktur negara, namun mempunyai posisi sebagai struktur antara yang disebut *intermediate-structure*, posisi antara suprastruktur pemerintah negara dengan infrastruktur kehidupan bersama dalam entitas masyarakat. Partai politik memiliki fungsi yang sangat penting dalam kegiatan bernegara, hal itu dapat dirumuskan sebagai berikut: pertama, sarana komunikasi politik dan penyerap aspirasi politik; kedua, sarana sosialisasi politik dan pendidikan politik; ketiga, sarana rekrutmen politik; dan keempat, sarana pengatur dan peredam konflik dalam masyarakat.

Berdasarkan realitas partai politik dan proses politik di negara demokrasi dewasa ini dalam perkembangannya, partai politik banyak mengalami

kemunduran terhadap nilai-nilai demokrasi, rata-rata dari partai politik modern telah menaggalkan posisinya sebagai *intermediate-structure* dan beralih masuk dalam kategori yang oleh Otto Kirchheimer diistilahkan sebagai '*catch all party*' atau 'partai tangkap semua'. Istilah '*catch all party*' ini mensinyalir bahwa posisi partai-partai politik modern yang ada saat ini secara drastis mereduksi nilai-nilai ideologis partai dalam rangka untuk mencapai tujuan memperoleh kekuasaan dengan cara memenuhi sebanyak mungkin jumlah pemilih dan kemenangan dalam pemilihan umum tanpa mengindahkan nilai-nilai ideologis partai.

Partai politik modern yang masuk dalam kategori *catch all* dapat dipandang mengedepankan sikap pragmatisme yang tidak lagi mendasarkan pada satu ideologi atau platfrom dalam menentukan sikap politik. Terkait kecenderungan partai dalam kategori *catch all* melakukan hal itu maka spektrum legitimasi partai politik ini adalah pada pertimbangan rasional partai. Pusat-pusat kekuasaan, perolehan banyak kedudukan di berbagai wilayah juga semakin terciptanya kesempatan turut memengaruhi kewenangan menjadi pertimbangan rasional partai-partai sebagai landasan penentuan keputusan-keputusan politik dalam realitas lapangan hari ini.

Pragmatisme yang lebih dikedepankan dibanding pada mengedepankan muatan ideologis partai mendorong terciptanya kemunduran dan menuntut adanya rekonstruksi partai baik secara internal maupun eksternal partai.

B. Benang Merah Partai Politik dan Proses Politik di Indonesia

Partai politik sebagai mana perannya untuk menyambung aspirasi masyrakat memiliki peran kunci bagi kesuksesan maupun kegagalan proses politik demokrasi di Indonesia. Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dewasa ini, banyak partai politik yang sudah tidak lagi mengindahkan nilai-nilai demokrasi sehingga menodai kelangsungan proses politik di Indonesia. Kiranya menjadi penting untuk meninjau bahkan melakukan rekonstruksi

secara masif untuk mengembalikan jalur politik di Indonesia kepada politik yang sehat berlandaskan nilai-nilai luhur demokrasi.

Setelah hak dasar politik dilembagakan dan orang-orang diberi kebebasan untuk mengekspresikan kepentingan, nilai-nilai, dan pendapat mereka, di dalam masyarakat akan muncul berbagai kelompok kepentingan. Proses demokrasi mengakomodasi keberagaman semacam ini dengan menawarkan peraturan (aturan main) dan norma.

Peraturan dan norma tersebut menjadi landasan bagi konsensus mayoritas dari berbagai kepentingan dan nilai yang ada. Inilah inti dari proses politik dalam sebuah masyarakat yang demokratis. Kemajemukan kepentingan dan nilai bukan saja tidak terhindarkan tetapi juga sah selama semua pihak masih menghormati legitimas dari lembaga demokrasi dan hukum yang ada.

Fungsi dasar dari sebuah partai politik (parpol) adalah untuk mengagregasikan kepentingan masyarakat, mengarahkannya pada kepentingan bersama, dan merancangnya dalam bentuk legislasi dan kebijakan, sehingga menjadi sebuah agenda yang bisa mendapatkan dukungan rakyat di saat pemilihan umum. Partai politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi modern. Tantangannya adalah bagaimana cara mengatur partai politik dan membuat mereka berfungsi secara demokratis.

Partai politik memainkan peran yang menentukan dalam sebuah sistem demokrasi modern dan merupakan pilar utama dalam pranata sistem politik. Parpol menerjemahkan nilai dan kepentingan suatu masyarakat dalam proses dari-bawah- ke-atas sehingga nilai dan kepentingan dari masyarakat itu menjadi rancangan undang-undang negara, peraturan peraturan yang mengikat, dan program bagi rakyat.

Suatu sistem demokrasi mengharuskan semua partai politik untuk selalu menerapkan demokrasi internal. Hal ini harus diundangkan juga sehingga berjalannya suatu demokrasi internal tidak bergantung pada kemauan baik

(‘*goodwill*’) dari pemimpin partai tersebut. Karena bila tidak, demokrasi akan terancam. Demokratisasi internal memberikan jaminan terhadap terbukanya ruang- ruang dialog dalam proses pembentukan kehendak politik. Partai politik harus berperan aktif dan memiliki kesadaran akan tanggung jawab terhadap sistem pemilu yang bebas yang memungkinkan rotasi anggota secara demokratis dan menjunjung keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Para pejabat partai yang memiliki posisi penting dalam partai baik pemimpin maupun fungsionarisnya mempunyai tendensi guna menghimpun kekuasaan di dalam tubuh partai politik mereka dan berusaha mendapatkan kekuasaan di luar tubuh partai politik juga. Sehingga rekonstruksi yang terjadi juga harus mengarah ke dalam atau internal partai, memperbaiki ruang-ruang demokrasi di internal partai untuk menghindari kecendrungan akan kekuasaan yang tidak dibungkus dalam nilai-nilai demokrasi dan menjaga struktur organisasi agar tetap terbuka terhadap kontrol demokratis dan partisipasi anggotanya serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan pengaruhnya.

Dengan demikian tindakan rekonstruksi partai politik akan sangat memengaruhi guna menjaga kelangsungan demokrasi yang merupakan sistem politik di Indonesia.

BAB VI PARTAI POLITIK DAN DEMOKRASI IDEAL

Praktik dalam proses berpolitik di indonesia mengalami berbagai fase naik dan turun, jatuh dan bangun dari masa ke masa, berbagai sistem politik pernah diterapkan di negara ini demi mencari format ideal bagi kebutuhan demokrasi ideal. Dewasa ini beberapa elemen kritis di negeri ini mendorong terjadinya reformasi dan rekonstruksi untuk demokrasi, dari tindakan tersebut banyak yang tidak menyadari bahwa tindakan terkait dapat membawa dampak yang sangat krusial pada peran partai politik yang menunjang proses berdemokrasi suatu negara. Meskipun saat ini berkembang kepercayaan bahwa demokrasi membutuhkan suatu infra-struktur politik baru, namun kebanyakan dari kita kurang berhasil mengembangkan perspektif baru yang lebih segar selain dari pemilihan umum yang bebas. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa pemilihan umum yang bebas merupakan syarat yang penting bagi demokrasi, namun demikian hal itu juga sejalan dengan sama pentingnya mengembangkan partai politik yang efektif dan dapat menunjang kebutuhan demokrasi yang ideal.

Perubahan politik yang lebih mendasar. Dalam waktu yang relatif sangat cepat terjadi perubahan yang sangat penting, percakapan berubah menjadi sebuah gerakan yang lebih masif walaupun kurang terorganisasi, agenda reformasi berubah menjadi aksi jalanan menuntut perubahan, dan pada akhirnya wacana akademis berubah menjadi praktik yang dilembagakan. Keterdesakan akan pentingnya melakukan rekonstruksi partai politik dan demokrasi di Indonesia merupakan wacana yang sudah tidak asing lagi bersamaan dengan maraknya istilah reformasi yang menjadi gerakan masif sepanjang akhir 1997 dan sepanjang 1998 yang timbul dari berbagai permasalahan di negeri ini, pada umumnya mengasumsikan masalah terpokok bagi sebuah perubahan di Indonesia terdapat pada negara (*state*), Kekuasaan yang korup, sentralistis, dan abai terhadap hak-hak sipil dan politik rakyat, hal ini dipandang sebagai sumber persoalan demokrasi di Indonesia.

Namun pada kenyataannya, kegagalan pemerintah dalam menjaga nilai- nilai luhur demokrasi juga tidak bisa disalahkan secara sepihak. Kegagalan

berdemokrasi sangat ketat dipengaruhi juga oleh kemampuan *civil society* yang diwakili oleh partai dalam menjaga dan mempertahankan nilai-nilai luhur demokrasi. Absennya partai-partai politik mungkin menjadi permasalahan inti yang harus ditangani secara serius. Sangat sulit untuk dibantah bahwa untuk waktu yang lama, tiadanya partai politik yang efektif di Indonesia telah mengakibatkan berbagai kesulitan yang luar biasa untuk melembagakan sebuah pola perubahan yang secara politik tidak saja terlembaga namun juga demokratis. Dalam kasus ini, partai politik memiliki peran kunci bagi keberhasilan demokrasi suatu negara.

Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen selama periode parlemen 1999-2004 yang dihasilkan oleh Pemilu 1999 mengubah banyak aspek dari hubungan tata-kenegaraan kita. Perubahan yang terjadi itu ditandai oleh beberapa hal, di antaranya yang terpenting adalah, pertama, parlemen terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kedua, seluruh anggota parlemen dipilih melalui pemilu yang berimplikasi pada diakhirinya sistem pengangkatan dan penunjukan anggota TNI/Polri dan perwakilan utusan golongan sebagai anggota parlemen. Ketiga, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Keempat, dibentuknya lembaga independen penyelenggara pemilu yang bebas dari pengaruh pemerintah. Kelima, pembentukan Mahkamah Konstitusi yang di antaranya memiliki kewenangan *judicial review*. Keenam, hadirnya sistem kepartaian jamak (*multiparty system*). Masih banyak yang dapat ditambahkan, di antaranya adalah, konstitusi baru juga memberikan dasar yang kuat pada pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, media bebas, dan otonomi yang lebih luas bagi daerah-daerah di Indonesia.

Dapat dikatakan bahwa perkembangan kelembagaan selama lima tahun pertama transisi demokrasi di negeri ini (1999-2004) telah dihasilkan perubahan yang sangat penting. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa banyak orang sangat puas dengan hasilnya pada tingkat praktik. Ketidakpuasan publik pada umumnya berhubungan dengan persepsi tentang meluasnya praktik korupsi di kalangan birokrasi pemerintah dan DPR (pusat dan daerah) serta persepsi tentang

ketidakcapakapan pemerintah untuk secara segera memulihkan perekonomian nasional sebagai akibat dari lemahnya penegakan hukum yang dapat menjamin ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat. Tentu saja masih banyak hal lain yang dapat disebut di sini, di antaranya yang terpenting adalah tentang masa depan transisi ini.

Dalam proses transisi yang berlangsung sejauh ini, terdapat beebrapa pertanyaan pokok yang berkembang di kalangan masyarakat, sehingga menjadi persoalan bagi demokrasi, pertanyaan-pertanyaan yang menyiratkan tidak saja keprihatinan namun juga mencerminkan kegelisahan mereka tentang masa depan Indonesia. Kegelisahan itu pada umumnya berkisar di sekitar persoalan tentang (1) seberapa cepat perubahan yang nyata itu akan terjadi, setidak-tidaknya dalam arahnya yang menjanjikan?; (2) seberapa mungkin perubahan itu dapat dilakukan dengan 'guncangan' yang mereka dapat menanggungnya lagi?; (3) seberapa masuk akal harapan terhadap perubahan itu digantungkan kepada para pemimpin mereka?; seberapa siap infrastruktur yang terdapat dalam masyarakat untuk ikut menentukan arah perubahan itu?; dan (5) bagaimanakah 'masa lalu' itu hendak diselesaikan? Respon masyarakat terhadap pertanyaan-pertanyaan itu pada umumnya mengabarkan kerisauan dalam ihwal bagaimana mereka semestinya memposisikan dirinya terhadap pertanyaan-pertanyaan itu.

Miskinnya pemahaman dan kepercayaan bahwa masyarakat sesungguhnya dapat menjadi bagian yang berarti dalam proses perubahan itu, dalam hemat saya, telah mengecilkan potensi bagi berkembangnya kesadaran kolektif yang penting bagi sebuah perubahan yang berpola partisipatoris. Keragu-raguan bahwa para pemimpin mereka sedang bekerja dalam arah yang menjanjikan juga menimbulkan rasa frustasi dan meningkatkan kecemasan tentang ada tidaknya masa depan yang lebih baik itu.

Di samping berkembangnya perasaan-perasaan alienasi yang meluas terhadap proses perubahan dan struktur yang memfasilitasi perubahan itu, kebanyakan dari mereka memiliki kepercayaan yang tidak jelas terhadap bagaimana perubahan itu

harus dilakukan dari mana memulainya?, siapa yang semestinya mengambil prakarsa?, mana yang harus diubah dan mana pula yang sebaiknya dipertahankan?, dengan ongkos apa dan berapa besar? Dan tentu saja, siapa yang menanggungnya? Apabila terdapat rasa percaya yang berlebihan ketika reformasi pada awalnya digulirkan, yang tampak menonjol pada periode 1999-2004 itu adalah kehilangan rasa percaya diri itu. Pada umumnya terdapat suasana untuk menghindari perdebatan tentang bagaimana masyarakat harus mengambil posisi terhadap perubahan itu. Apa yang tampak menonjol justru hasrat yang besar untuk melihat bahwa perubahan itu akan datang dengan sendirinya, pada waktunya.

Walaupun tidak mudah untuk merumuskan perasaan-perasaan yang mewakili keprihatinan masyarakat luas itu, saya menangkap kesan yang amat kuat bahwa masyarakat melihat adanya kesenjangan yang besar di antara apa yang mereka lihat dan alami pada masa itu dan gambaran yang mewakili harapan mereka sebelumnya tentang reformasi. Akibatnya sangat buruk. Banyak orang di negeri ini menjadi tidak sabar dengan perubahan ini dan bertanya-tanya tentang “ke mana semua kekacauan ini akan berakhir”. Liberalisasi politik yang diletakkan dasardasarnya sebelumnya oleh Presiden Habibie dan yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Abdurahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri sering dipersepsi sebagai hanya menghasilkan frustasi sosial yang luas sebuah kondisi yang dilihat oleh banyak orang sebagai cocok untuk menghasilkan kehendak untuk kembali ke sistem politik lama.

Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Adakah kecemasan bagi berkembangnya ketidakpuasan terhadap transisi demokrasi ini sebagai sungguh mencerminkan keadaan yang sebenarnya ataukah sesuatu yang agak dilebih-lebihkan? Penjelasan banyak orang tentang isu ini memang bermacam-macam. Di kalangan para aktivis pro-demokrasi 70-an, terdapat kecenderungan untuk percaya bahwa apa yang sedang terjadi ini merupakan proses pencarian keseimbangan baru. Sebuah proses yang walaupun penuh guncangan dipercaya akan diakhiri dengan hadirnya sebuah harmoni baru yang terutama ditandai oleh terjadinya konsensus

tentang bagaimana sebuah sistem politik baru hendak dikelola secara kolektif. Dalam pandangan mereka, misalnya Rahman Toleng dan Nurcholis Madjid, diperlukan waktu 20 hingga 25 tahun lagi untuk menghasilkan demokrasi yang lebih stabil.

Sementara itu, aktivis pro-demokrasi 90-an memahami persoalan itu sebagai perwujudan kegagalan elemenelemen strategis dalam *civil society* untuk melakukan konsolidasi secara cepat dalam transisi ini. Dalam pandangan mereka, kaum reformis dalam keadaan terpecah belah dan tidak sepenuhnya siap untuk mengambil posisi baru terhadap situasi baru. Sangat sedikitnya kaum reformis untuk terlibat secara aktif dalam partai-partai politik dan menjadi bagian penting dalam parlemen adalah contoh yang umum dipakai untuk menjelaskan kecenderungan itu. Reformasi politik di tingkat negara, oleh kalangan ini, dilihat hanya menghasilkan lembaga-lembaga baru melalui undang-undang baru. Hasilnya hanyalah sebuah praktik demokrasi yang berdasarkan pada formalitas, mekanisme, dan prosedur politik untuk memperebutkan kekuasaan daripada sekaligus sebuah tradisi baru dalam demokrasi. Dalam bentuk yang lebih sinis, mereka bahkan menuduh para aktor politik dominan yang sebagian besar terdiri atas mereka yang berada di parlemen sebagai telah membajak demokrasi; memakai tatacara demokrasi untuk tujuan dan kepentingan mereka sendiri: kekuasaan, jabatan, dan uang.

Di kalangan para analis politik, transisi demokrasi selama lima tahun di Indonesia ditandai oleh apa yang mereka konseptualisasikan dengan istilah “demokrasi yang mengalami defisit”. Salah satu bagian terpenting dari analisis tentang ihwal ini menyoroti peran partai politik yang dianggap kurang serius menjalankan agenda reformasi untuk tujuan demokrasi. Secara umum, partai-partai politik di Indonesia menjadi kehilangan orientasi ideologisnya yang sejati bagi sebuah perubahan yang bermakna. Para elite partai sering terlibat dalam perdebatan yang ditandai oleh bercampurnya secara tidak jelas konflik ideologis (*ideological battlefield*) dan perebutan kekuasaan (*power struggle*) Keduanya bercampur, sering

sangat manipulatif karena menggunakan tema ideologis untuk sebuah tujuan yang sangat politis, yakni kekuasaan untuk kekuasaan.

Alih-alih menjadi bagian yang produktif dari transisi ini, kebanyakan partai politik berubah menjadi alat kekuasaan bagi sekelompok kecil pengurusnya, jatuh sebagai kendaraan politik untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok perorangan yang bergabung dengan partai politik dengan dan untuk motif yang tidak berkaitan sama sekali dengan tujuan reformasi yang bermuara pada kepentingan perubahan untuk sebuah Indonesia yang lebih demokratis, adil dan sejahtera. Salah satu implikasi penting dari proses ini adalah menurunnya fungsi representasi dari partai politik dan bahkan parlemen terjadi justru ketika pemilihan umum berlangsung lebih demokratis. Implikasi lainnya yang datang segera dan sangat serius adalah meningkatnya ketidakpercayaan publik pada partai politik.

Tentu tidak sepenuhnya adil mengatakan bahwa buruknya kinerja partai politik itu melulu disebabkan oleh motif yang sepenuhnya politis. banyak partai politik selama periode lima tahun pertama reformasi itu kurang memiliki peralatan ideologis, politik, dan organisasional yang memadai untuk memahami dan menjalankan peran strategis mereka sebagai lembaga politik yang sangat penting dalam demokrasi. Secara umum, dapat dikatakan bahwa masalah terpokok yang dihadapi oleh partai-partai politik di Indonesia berhubungan dengan lima isu utama: (1) kapasitas organisasional (seperti misalnya kemampuan memobilisasi dan mengelola sumber- sumber finansial, personel, dan material); (2) memelihara integrasi (seperti misalnya kemampuan mencegah perpecahan internal sebagai akibat dari hadirnya perbedaan dalam tubuh partai); (3) mempraktikan demokrasi secara internal (misalnya menegakkan mekanisme yang demokratis dalam pengambilan keputusan penting); (4) kemampuan memenangkan pemilu (seperti misalnya dalam menentukan isu-isu kampanye dan rekrutmen kandidat anggota parlemen), dan; (5) pengembangan ideologi partai (seperti misalnya dalam

menentukan posisi partai terhadap isu-isu strategis yang berkembang dalam masyarakat.

Potret dari kebanyakan partai politik di Indonesia pada umumnya ditandai oleh hadirnya masalah yang serius hampir di semua isu itu: dari kapasitas organisasional hingga ideologi. Akibatnya sangat jelas, alih-alih menjalankan fungsi mediasi dan moderasi kepentingan konstituen, pendidikan politik, dan rekrutmen elite, kebanyakan partai politik lebih sibuk bertikai satu sama lain dan, lebih buruk dari itu, bertikai di antara mereka sendiri sesama anggota partai di hampir setiap kali mereka harus membuat kebijakan penting partai.

Peristiwa di sekitar suksesi kepemimpinan par-tai menjadi ilustrasi yang baik untuk menggambarkan kuatnya kecenderungan partai sebagai ajang pertarungan kepentingan pemimpinnya. Kepemimpinan partai politik menjadi kian sulit dipisahkan dengan pribadi-pribadi yang menjadi pemimpinnya. Dengan kata lain, kebanyakan partai politik mengalami proses personalisasi melalui pemimpinnya. Pembaharuan dari dalam, termasuk di antaranya ketika menyentuh pertanyaan tentang kepemimpinan, menjadi tidak mudah dilakukan. Partai-partai politik semacam itu menjadi tidak lagi bersifat terbuka pada gagasan-gagasan alternatif yang mendorong perubahan dari dalam. Bahkan, dalam banyak kasus, mekanisme pengambilan keputusan penting di dalam organisasi sering mengabaikan prinsip-prinsip utama yang dijunjung tinggi dalam demokrasi. Untuk menambah sedikit keruwetan yang telah ada, proses-proses penting dalam isu rekrutmen dan sirkulasi elite sangat diwarnai oleh kuatnya praktik-praktik manipulatif.

Di atas semua itu, cukup banyak partai yang gagal mengembangkan identitas partai secara jelas karena tidak memiliki landasan ideologi yang kuat dan mengakar. Gambaran ini dengan jelas telah mengakibatkan kebanyakan partai di Indonesia itu memiliki potret diri yang agak jauh dari gambaran sebuah partai modern.

A. Perjalanan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang selama ini dianut oleh negara Indonesia. Seiring berjalannya waktu demokrasi terus bertransformasi secara adaptif untuk menyesuaikan proses politik sesuai dengna kondisi politik dan pemerintahan saat itu.

Sebuah sistem demokratis dicirikan: (1) partisipasi politik yang luas; (2) kompetisi politik yang sehat; (3) sirkulasi kekuasaan yang terjaga, terkelola, dan berkala, melalui proses pemilihan umum; (4) pengawasan terhadap kekuasaan yang efektif; (5) diakuinya kehendak mayoritas; (6) adanya tata krama politik yang disepakati dalam masyarakat. Tidak salah apabila demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan kata lain, rakyat selaku mayoritas mempunyai suara menentukan dalam proses perumusan kebijakan pemerintahan melalui saluran-saluran yang tersedia, seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan pendapat umum.

1. Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Revolusi (1945-1950)

Tahun 1945-1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik karena masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan. Hal itu terlihat pada Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut, pemerintah mengeluarkan:

a. Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif;

b. Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai Politik;

c. Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensil menjadi parlementer.

2. Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Orde Lama

a. Masa Demokrasi Liberal 1950-1959

Pada tahun 1950-1959 bisa disebut sebagai masa demokrasi liberal yang parlementer, dimana presiden sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan banyak berkembangnya partai-partai politik.

Pada masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Akan tetapi, praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan:

a. dominannya partai politik;

b. landasan sosial ekonomi yang masih lemah;

c. tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950.

Atas dasar kegagalan itu, Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya:

1) Bubarkan konstituante.
2) Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUDS 1950.
3) Pembentukan MPRS dan DPAS.

Sejak berakhirnya pemillihan umum 1955, presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya

kepada partai-partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat orientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh.disamping itu Soekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa indonesia yang dijiwai oleh Pancasila.

3. Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1966

Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom. Ciri-cirinya adalah:

a. tingginya dominasi presiden;
b. terbatasnya peran partai politik;
c. berkembangnya pengaruh PKI.

Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain:

a. sistem kepartaian menjadi tidak jelas, dan para pemimpin partai banyak yang dipenjarakan;
b. peranan parlemen lemah, bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR;
c. jaminan HAM lemah;
d. terjadi sentralisasi kekuasaan;
e. terbatasnya peranan pers;
f. kebijakan politik luar negeri memihak ke RRC (Blok Timur) yang memicu terjadinya peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI.

Di dalam buku tulisan Mohammad Hatta, pada bab-bab awal Hatta memaparkan mengenai kritiknya terhadap demokrasi terpimpin yang dibuat oleh Soekarno untuk menggantikan demokrasi parlementer. Meski memasang nama ‘demokrasi’, namun demokrasi terpimpin yang didefinisikan Soekarno sebagai sebuah cara untuk membangun negara di bawah suatu pimpinan ini pada hakikatnya adalah sebuah sistem yang diktator. Oleh karenanya banyak orang yang mengira demokrasi akan lenyap dari Indonesia. Tetapi dalam tulisannya, Hatta menampik pesimisme dari pandangan tersebut, sebab menurutnya demokrasi di Indonesia telah mengakar di dalam pergaulan hidup masyarakat, sehingga tidak akan dapat dilenyapkan. Sehingga keadaan ini menurut Hatta hanyalah merupakan krisis dari demokrasi.

4. Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Orde Baru 1966-1998

Pelaksanaan demokrasi Orde Baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan di segala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan masa Orde Baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Sekalipun demikian, perjalanan demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal dengan alasan:

a. tidak adanya rotasi kekuasaan eksekutif;
b. rekrutmen politik yang tertutup;
c. pemilu yang jauh dari semangat demokratis;
d. pengakuan HAM yang terbatas;
e. tumbuhnya KKN yang merajalela.

5. Pelaksanaan Demokrasi Orde Reformasi 1998-Sekarang

Demokrasi pada masa reformasi pada dasarnya merupakan demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR-MPR hasil Pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain dengan:

a. Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi;
b. Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referandum;
c. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN;
d. Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI;
e. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV.

B. Konsep Partisipasi Demokrasi untuk Format Demokrasi Ideal

Munculnya konsep partisipasi dalam sistem demokrasi sehingga melahirkan '*participatory democracy*' berkaitan dengan adanya gerakan '*New Left*' sebagai pengaruh dari '*legitimation crisis*' pada tahun 1960-an. Gerakan '*New Left*' yang memunculkan demokrasi partisipatoris adalah '*the main counter-models on the left to the legal democracy*'. *Legal democracy* bertumpu pada

premis '*pluralist theory of politics*' yang mengacu pada teori '*overloaded government*', sedangkan demokrasi partisipatoris bertumpu pada premis '*Marxist*' yang mengacu pada teori '*legitimation crisis*'.

Gerakan dalam upaya memberdayakan masyarakat untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan telah merambah ke berbagai negara, termasuk Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Oleh karena itu, wacana tentang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam proses berdemokrasi di Indonesia.

Huntington memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan yang dilakukan oleh para warga negara dengan tujuan memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi dapat dilakukan secara spontan, secara kesinambungan atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif .

Dari definisi partisipasi politik yang di dalamnya terdapat empat hal pokok tersebut, diambil pemahaman bahwa gerakan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan, pada dasarnya berpangkal pada adanya desirability dari masyarakat untuk mewujudkan *self government* dalam demokrasi partisipatoris. Setidaknya terdapat lima penyebab pokok yang memberikan dorongan terhadap keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan, yaitu (1) modernisasi; (2) perubahanperubahan struktur kelas sosial; (3) pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern; (4) konflik di antara kelompok- kelompok pemimpin politik; (5) keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

Dalam kaitan partisipasi dalam proses politik, ada faktor-faktor yang dapat memengaruhi tinggi rendahnya partisipasi seseorang, yaitu kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Kesadaran politik

adalah kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara yang dapat berupa pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, serta minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup. Adapun sikap dan kepercayaan pada pemerintah adalah penilaian seseorang terhadap pemerintah, apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak.

Berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat memengaruhi tinggi dan rendahnya partisipasi seseorang dalam melihat suatu persoalan dalam lingkungannya, menurut Jeffry M. Paige dalam Surbakti dikemukakan empat tipe partisipasi, yaitu:

1. apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan pada pemerintah yang tinggi, partisipasi politik cenderung aktif;
2. apabila seseorang tingkat kesadaran politik dan kepercayaan pada pemerintah rendah, partisipasi politik cenderung pasiftertekan (apatis);
3. apabila kesadaran politik tinggi, tetapi kepercayaan pada pemerintah sangat rendah, akan lahir militan radikal;
4. apabila kesadaran politik sangat rendah, tetapi kepercayaan pada pemerintah sangat tinggi, akan lahir partisipasi yang tidak aktif (pasif).

Dari berbagai hal yang berkaitan dengan partisipasi di atas, terlihat bahwa problematika partisipasi dalam kehidupan berdemokrasi menjadi suatu masalah yang dapat diperdebatkan. Tuntutan adanya partisipasi dalam suatu negara demokrasi pada satu sisi merupakan suatu keniscayaan, namun pada sisi lain dipertanyakan apakah partisipasi itu dapat dilakukan dalam kerangka kebebasan dan persamaan warga negara dalam penyelenggaraan suatu negara. Permasalahan tersebut kemudian menuntun pada pertanyaan, apakah pemerintahan yang demokratis itu bergantung pada ada dan tidaknya

partisipasi dari masyarakat dalam membuat keputusan pemerintahan? Jika adanya partisipasi ini menjadi ukuran dalam proses pengambilan keputusan yang demokratis, ukuran apakah untuk menentukan bahwa suatu partisipasi masyarakat itu merupakan keinginan bersama dalam masyarakat?

Partisipasi masyarakat hakikatnya merupakan persoalan nilainilai yang bertalian dengan moralitas suatu masyarakat. Ketika permasalahan partisipasi terkait dengan permasalahan moral, akan sulit menentukan nilai-nilai moral dari masyarakat yang ukurannya niscaya berbeda-beda. Dengan demikian, demokrasi bergantung pada penyerapan nilai-nilai moral yang baik dalam masyarakat.

Pada dasarnya, demokrasi adalah partisipasi seluruh rakyat dalam mengambil keputusan politik dan menjalankan pemerintahan. Keputusan politik yang dimaksud adalah kesepakatan yang ditetapkan menjadi sebuah aturan yang akan mengatur kehidupan seluruh rakyat itu sendiri. Keterlibatan atau partisipasi rakyat adalah hal yang sangat mendasar dalam demokrasi karena demokrasi tidak hanya berkaitan dengan tujuan sebuah ketetapan yang dihasilkan oleh suatu pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan seluruh proses dalam membuat ketetapan itu sendiri.

Menurut Thomas R. Dye dan Harmon Zeilgler dalam *The Irony of Democracy Uncommon Introduction to American Politic*, gagasan dasar dari demokrasi merefleksikan empat hal, yaitu:

1. partisipasi rakyat dalam keputusan yang membentuk kehidupan individu- individu dalam suatu masyarakat;
2. pemerintahan yang dipimpin oleh mayoritas dengan pengakuan hak-hak minoritas, yaitu hak kebebasan berbicara, ber serikat, berkumpul, mendapatkan informasi, membentuk partai oposisi, dan menjalankan jabatan-jabatan publik;

3. komitmen untuk menghargai martabat individu dan menjamin nilai-nilai kehidupan, yaitu kebe basan dan kepemilikan;

4. komitmen untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk mengembangkan kemampuan dirinya.

Demokratisasi muncul sebagai kebutuhan dan masalah apabila kehidupan bernegara yang dicita-citakan sebagai kehidupan bernegara yang demokratis ternyata belum terwujud seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, demokratisasi merupakan proses yang hendak mengatasi batasan-batasan diskriminatif, untuk merealisasikan atau menyempurnakan kehidupan demokrasi sehingga warga atau lapisan masyarakat tidak terhalang oleh status atau hak-hak sosialnya, dapat berpartisipasi dalam berbagai aktivitas yang menyangkut urusan-urusan publik dan pemerintahan.

Perlakuan demokrasi di setiap negara tidak selalu sama karena demokrasi pada kenyataannya, memang tumbuh, bukan diciptakan. Setidaknya, negara dikatakan demokratis jika memenuhi syarat sebagaimana dikemukakan oleh Bagir Manan, yaitu adanya:

1. kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan;
2. kebebasan menyatakan pendapat;
3. hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara;
4. kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintahan atau negara;
5. hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara;
6. berbagai sumber informasi;
7. pemilihan yang bebas dan jujur;
8. lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan.

Kehidupan masyarakat yang demokratis yang kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan dilakukan dengan sistem perwakilan, dan adanya peran aktif masyarakat dapat memberikan manfaat bagi perkembangan bangsa, negara, masyarakat. Suatu negara demokrasi yang ideal setidaknya dapat ditandai dengan ciri-ciri berikut:

1. Kesetaraan sebagai Warga Negara

   Prinsip kesetaraan tidak hanya menuntut bahwa kepentingan setiap orang harus diperlakukan sama dan sederajat dalam kebijakan pemerintah, tetapi juga menuntut perlakuan yang sama terhadap pandangan atau pendapat dan pilihan setiap warga negara.

2. Memenuhi Kebutuhan-kebutuhan Umum

   Dibandingkan dengan pemerintahan tipe lain seperti sosialis dan fasis, pemerintahan yang demokratis lebih mungkin untuk memenuhi kebutuhan rakyat biasa. Rakyat biasalah yang merasakan pengaruh kebijakan pemerintah dalam praktiknya. Sebaliknya, kebijakan pemerintah dapat mencerminkan keinginan rakyat hanya jika ada saluran pengaruh dan tekanan yang konsisten dan efektif dari bawah.

3. Pluralisme dan Kompromi

   Demokrasi mengandalkan debat terbuka, persuasi, dan kompromi. Penekanan demokrasi pada debat tidak hanya mengasumsikan adanya perbedaan pendapat dan kepentingan pada sebagian besar masalah kebijakan, tetapi juga menghendaki bahwa perbedaan-perbedaan itu harus dikemukakan dan didengarkan. Dengan demikian, demokrasi mengisyaratkan kebhinekaan dan kemajemukan dalam masyarakat ataupun kesamaan kedudukan di antara para warga negara.

4. Menjamin Hak-hak Dasar

   Demokrasi menjamin kebebasan dasar. Diskusi terbuka sebagai metode mengungkapkan dan mengatasi masalah-masalah perbedaan

dalam kehidupan sosial tidak dapat terwujud tanpa kebebasan yang ditetapkan dalam konvensi tentang hak-hak sipil dan politis: hak kebebasan berbicara dan berekspresi, hak berserikat dan berkumpul, hak bergerak, dan hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan diri.

5. Pembaruan Kehidupan Sosial

   Penghapusan kebijakan yang telah usang secara rutin dan penggantian para politisi dilakukan dengan cara yang santun dan damai, menjadikan sistem demokrasi mampu menjamin pembaruan kehidupan sosial.

Sedangkan Hatta merumuskan lima anasir demokrasi Indonesia yang ideal yakni musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan masalah, gotong royong, hak untuk mengadakan protes terhadap peraturan pemimpin yang tidak adil dan hak untuk menjatuhkan pemimpin (hak untuk menentukan nasib sendiri), merupakan pondasi dasar demokrasi di Indonesia yang harus dijadikan dasar pemerintahan Indonesia ke depannya.

Hatta juga menegaskan bahwa demokrasi politik, tidak boleh dilepaskan dari demokrasi ekonomi. Di mana jika dalam demokrasi barat yang dikembangkan dalam membangun perekonomian adalah ekonomi kapitalisme, karena landasan demokrasinya adalah Individualisme. Maka dalam demokrasi Indonesia, perlu dikembangkan koperasi untuk melawan kapitalisme ini. Koperasi akan efektif dalam menghadapi kapitalisme dikarenakan organisasi ini merupakan organisasi rakyat jelata yang berdasarkan solidaritas dan kesetiakawanan.

A. Demokrasi Ideal dan Kesejahteraan Masyarakat

Konsepsi demokrasi Indonesia yang berbeda akar dengan konsepsi Rousseau yang bersifat individualisme. Kedaulatan rakyat di Indonesia haruslah bercorak kolektivisme, di mana didalamnya mengandung semangat kebangsaan yang

tumbuh untuk menentang imperialisme dan kapitalisme Barat sehingga demokrasi Barat harus ditolak sebab akar dari tumbuhnya demokrasi di Indonesia berbeda dari demokrasi barat. Demokrasi di Indonesia berasal dari tiga hal, yakni pertama, paham sosialisme Barat di mana perikemanusiaan menjadi perhatian utama. Kedua, ajaran agama terutama Islam (karena dipeluk mayoritas rakyat Indonesia) yang menjunjung tinggi persaudaraan di antara sesama manusia dan terakhir adalah pengetahuan bersama bahwa masyarakat Indonesia berdasarkan kolektivisme.

Persoalan Demokrasi segaris lurus dengan kesejahteraan entitas masyarakat di dalamnya memiliki hubungan kausalitas yang saling memengaruhi, demokrasi yang baik dan ideal akan membentuk masyarakat yang sejahtera, begitupun sebaliknya. Perdebatan mengenai korelasi keduanya hingga saat ini belum juga padam, mengingat negara kita belum mencapai konsepsi demokrasi idealnya, bahkan kita tidak dapat memastikan secara jelas apakah demokrasi dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakatnya ataukah tidak.

Jika kita mengacu pada spirit reformasi yang dibangun rakyat Indonesia, maka visi besarnya secara umum dapat digambarkan sebagai bentuk penciptaan sistem politik dan pemerintahan yang didalamnya rakyat memiliki porsi besar untuk berpartisipasi dan beraspirasi terhadap kebijakan-kebijakan yang lahir dari pemerintah. Hal ini secara prosedural sejatinya telah dipenuhi melalui berbagai demokratisasi kebijakan oleh pemerintah pasca orde baru. Pemberian otonomi daerah dan pelaksanaan Pemilu secara langsung, merupakan realisasi konkret atas mandat tersebut.

Namun sangat disayangkan bahwa proses demokrasi ideal yang menjadi visi bersama itu tidak hanya bergantung pada demokratisasi kebijakan yang hanyalah suatu variabel antara, bukan tujuan yang sebenarnya, hal ini yang belum kita pahami sepenuhnya, demokrasi yang dijelmakan dalam bentuk

kebijakan haruslah dapat memengaruhi terhadap signifikansi kesejahteraan rakyatnya.

Sebagai contoh dalam praktik lapangan demokrasi saat ini, pemilu langsung yang kita tahu dalam prosesnya memberikan rakyat kewenangan untuk memilih kandidat secara langsung, hal ini merupakan representasi dari demokrasi yang seharusnya mampu memberikan dampak kesejahteraan bagi rakyat itu sendiri, tapi pada faktanya tidak demikian dan tidak sesuai dengan harapan, terjadi suatu sumbatan yang terjadi pada variabel antara tersebut yang bercampur dengan berbagai kepentingan sehingga terjadi berbagai penyimpangan yang justru merugikan rakyat, meninjau realitas ini maka kita harus meninjau ulang model demokrasi saat ini yang tengah berjalan, apakah sudah sesuai dengan prinsip dan visi demokrasi yang kita impikan sejak awal atau justru semakin jauh dari khitah demokrasi Indonesia. Jika memang terjadi penyimpangan dalam proses demokrasi Indonesia saat ini, maka rekonstruksi perlu dilakukan bahkan menjadi suatu keharusan guna membentuk sistem demokrasi yang ideal yang memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyrakatnya.

Perbaikan bisa dimulai dari peran partai politik sebagai medium masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Partai politik harus proaktif dalam upaya merekonstruksi demokrasi agar terbentuk sistem demokrasi yang ideal, dibutuhkan tanggung jawab dan kesadaran moral dari para pemangku kepentingan dalam proses demokrasi. Kapasitas, kapabilitas, serta integritas para pemangku kepentingan inilah yang lebih lanjut akan menentukan bobot demokrasi terhadap variabel antara yang akan dijalankan. Partai politik harus mampu menciptakan iklim demokrasi yang terbebas dari berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi, internal partai politik harus mampu menelurkan kader-kader yang mampu menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang ideal dan sesuai dengan kepribadian bangsa.

Secara garis besar kita sepakat bahwa terdapat kausalitas (sebab-akibat) antara demokrasi dan kesejahteraan. Atas dasar kesepemahaman tersebut, maka perlu kesadaran bersama untuk sama-sama merekonstruksi dan terus meningkatkan kualitas demokrasi itu sendiri yang mana diharapkan kemajuan demokrasi akan berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Parameter yang dapat dilakukan dari kedua variabel tersebut dapat dilihat dari tiga indikator utama, yaitu aspek kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik, dan kelembagaan politik. Secara keseluruhan berdasarkan pengukuran yang dilakukan Bappenas RI dengan *the United Nations Development Program* (UNDP) menghasilkan model pengukuran bertajuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), tingkat IDI dari 2009-2018, demokrasi Indonesia bisa dikatakan berada pada level 'sedang'. Dengan berkiblat pada model ini, maka secara sederhana konklusi yang bisa ditarik adalah butuh penguatan pada tiga indikator tersebut agar kualitas demokrasi bisa melejit naik, tidak lagi berada pada level 'sedang'.

Meskipun demokrasi hanya dipandang sebagai sebuah alat, bukan tujuan, namun demikian demokrasi yang diwujudkan dalam bentuk demokratisasi kebijakan untuk meningkatkan indikator variabel antara demokrasi dan kesejahteraan pada hakikatnya merupakan variabel antara untuk menuju tujuan yang sebenarnya.

Parameter lainnya yang bisa dijadikan indikasi terhadap kesejahteraan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Demokrasi memiliki relevansi dengan Indeks Pembangunan Manusia sehingga kedua indikasi ini akan menentukan secara komprehensif kualitas demokrasi dan kesejahteraan negara kita. Jika dikerucutkan lebih jauh, indikator-indikator yang terhimpun tersebut mencakup angka harapan hidup, angka melek huruf, lama rata-rata sekolah, serta kemampuan daya beli masyarakat. Meskipun diakui bahwa terminologi kesejahteraan sangatlah luas, setidaknya penetapan

beberapa indikator tersebut dapat menjadi batasan yang proporsional dalam merepresentasikan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dari pembahasan sebelumnya maka kita sudah memperoleh gambaran utuh mengenai korelasi antara demokrasi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, baik secara holistik mencakup Indonesia secara keseluruhan, maupun masing- masing daerah demokrasi dapat menemukan format idealnya. Demokrasi ideal yang memiliki kausalitas terhadap kesejahteraan mengharuskan demokrasi mengkonversi diri yang tidak hanya berjalan pada tataran prosedural melainkan juga menjadi demokrasi yang bersifat substansial.

Demokrasi jangan lagi sekedar dimaknai sebatas kebebasan menyatakan pendapat, membentuk partai politik, menyelenggarakan Pemilu, dan hal-hal lainnya yang hanya merupakan prosedur demokrasi semata. Demokrasi ideal menawarkan sebuah penawaran konkret dan dekat dengan kenyataan hidup masyarakat, yakni dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Dengan memahami pola pertautan antara demokrasi dan kesejahteraan tersebut, rakyat diharapkan dapat lebih jeli dalam memilih calon pemimpin yang benar-benar memiliki program konkret dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah. Rakyat bisa langsung mengeliminir kandidat yang ‘lemah pikir’ dalam merumuskan visi-misinya. Kandidat bodoh tak layak untuk dipilih.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian. 1971. *Beberapa Masalah Pembaharuan Politik di Indonesia*. Jakarta: LEKNAS.

Almond, Gabriel. 1965. *Studi Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Anggara, Sahya. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

Budiardjo, Mariam. 1972. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Dian Rakyat.

Budiardjo, Miriam. 2003. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

Bulkin, Farhan. 1985. *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Dwiyanto, Agus dkk. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Yogyakarta.

Harun, Rochajat, Sumarno A.P. 2006. *Komunikasi Politik sebagai Suatu Pengantar*. Bandung: Mandar Maju.

Hasibuan, Malayu S.P. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Imawan, Riswandha. 2000. "*Reformasi Politik dan Demokratisasi Bangsa*". Dalam Selo Soemarjan. *Menuju Tata Indonesia Baru*. Jakarta: Gramedia.

Isjwara. 1982. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Bina Cipta.

Isjwara. 2006. *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Rahman, H.I.A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahman, A., Syahrial dkk. 2000. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Robbins, Stephen P. 1993. *Organizational Behavior*. New York: Prentice Hall, Englewood Clif.

Rodee, Carlton Clymer dkk. 2000. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Simon, Herbert A. 1976. *Administrative Behavior*. New Jersey: Free Press.

Sudarsono, Juwono. 1976. *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*. Jakarta: Gramedia.

Sukarna. 1992. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Winarno, Budi. 2008. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Buku Kita.

BIOGRAFI PENULIS

Dr. H. Cecep Suryana, Drs. M.Si. Menamatkan pendidikan kesarjanaannya S1 di Fakultas ushuluddin IAIN SGD Bandung dengan mengambil spesial di Bidang Dakwah pada tahun 1991 dengan gelar Doktorandus {Drs}. Setelah mengikuti prosesi wisuda Sarjana Bulan Maret tahun 1992 berkesempatan menjadi dosen magang di almamaternya. Hingga pada tahun 1994 memperoleh kesempatan diangkat sebagai Dosen PNS. Pada tahun 2003 berhasil menyelesaikan pendidikan S2 nya dengan memperoleh gelar Magister Sains {M.Si.} dari Unpad Bandung dengan mengambil kajian Komunikasi. Merupakan pendidikan terakhirnya jenjang S3 diselesaikannya pada tahun 2016 di Uninus Bandung dengan Judul disertasi yang ditulisnya “Strategi Komunikasi Kebijakan Pendidikan” dengan mendapatkan gelar akademik sebagai Doktor bidang Manajemen Pendidikan. Kurang lebih 4 tahun belakangan ini mendapat kepercayaan dari pimpinan fakultasnya yaitu Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SGD Bandung untuk mengampu mata kuliah di S1 yaitu, : Komunikasi Politik, Pengantar Ilmu Politik, Dasar-dasar Ilmu Komunikasi, Sistem Politik Indonesia pada Prodi Jurnalistik,Hubungan Masyarakat, Bimbingan Konseling Islam, dan Komunikasi Penyiaran Islam. Adapun pada jenjang S2 di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam mengampu mata kuliah Komunikasi Politik. Penulis pun beberapa kali mendapatkan kesempatan menjadi narasumber pada kegiatan diskusi, seminar, workshop, perumusan dan pembuatan perda pendidikan yang diadakan Dinas Pendidikan.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan buah dari kolaborasi terhadap penugasan pada mahasiswa Komunikasi penyiaran Islam semester enam dan mahasiswa jurnalistik semester empat tahun 2022 bekerjasama dengan dosen pengampu Mata Kuliah Sistem politik Indonesia Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tentu saja, amat di sayangkan bila hasil dari penelitian mahasiswanya tidak sampai dibuat menjadi buku. Atas niat yang mulia

itu ditambah kebaikan dari pihak penerbit, akhirnya buku ini bisa hadir dihadapan pembaca. Sebelumnya, Buku pertama yaitu: Komunikasi Politik: Teori dan Praktik yang diterbitkan pada tahun 2019 di terbitkan oleh CV. Mimbar Pustaka Bandung, Buku ke 2 yaitu: Pesan-pesan Pelatihan Terhadap Peningkatan Partisipasi Pembangunan di Kalangan Pegawai yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh Lufti Gilang Banyumas. Buku ke 3, yaitu Komunikasi Kebijakan Pendidikan di terbitkan oleh Jakad Media Surabaya pada tahun 2021. Beberapa tulisannya pernah dimuat pada Jurnal Ilmu Dakwah, Jurnal Annida, Jurnal Communicatus, yang diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi tempat tugasnya mengabdi selama ini. Ada juga tulisannya yang telah terbit di jurnal internasional. Untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat pada akun Google Cendikia: Cecep Suryana. Beberapa kegiatannya sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat di posting pada akun facebook dengan alamat cecep suryana majalengka dan akun instagram dengan alamat csuryana56.

Mochamad Adlan Fauzan. Dilahirkan pada tanggal 20 Juli 2000 di Kota Bandung. Merupakan seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2019. Pada tahun 2013 lulus dari SD Negeri Griba 14, tahun 2016 lulus dari SMP Al Biruni Cerdas Mulia, dan tahun 2019 lulus dari SMK PGII 2 Bandung.

Muhammad Husna Hisaba. Dilahirkan pada tanggal 11 Oktober 2000 di Kota Cirebon. Merupakan seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2019. Pada tahun 2013 lulus dari SD Negeri Karya Mulya 1 Cirebon, tahun 2016 lulus dari MTs IBS Al-Ishlah Kab. Cirebon, dan tahun 2019 lulus dari MAN 2 Kota Cirebon.

Muhammad Zarkasih. Dilahirkan pada tanggal 04 Oktober 2000. seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Merupakan angkatan 2019 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada tahun 2013 lulus dari SD Negeri Panunggangan 04 Tangerang, tahun 2016 lulus dari SMP Negeri 01 Pamarayan, dan tahun 2019 lulus dari SMK Ikhlas Multiprogram Jawilan Serang.

Muthi Amrullah Harahap. Dilahirkan pada tanggal 13 September 2001 di Kota Kisaran. Merupakan seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2019. Pada tahun 2013 lulus dari SDS Sariputra, tahun 2016 lulus dari SMP Negeri 1 Padangsidimpuan, dan tahun 2019 lulus dari MA Negeri 1 Padangsidimpuan.

Nur Islakhul Khasanah. Dilahirkan pada tanggal 17 Agustus 2001 di Kota Pemalang. Merupakan seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2019. Pada tahun 2013 lulus dari SD Negeri 03 Kaligelang, tahun 2016 lulus dari MTs Negeri 01 Pemalang, dan tahun 2019 lulus dari MA Negeri Pemalang.

Nurliana Amelia. Dilahirkan pada tanggal 31 Mei 2001 di Kota Bandung. Merupakan seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2019. Pada tahun 2013 lulus dari SD Negeri Puteraco Indah Bandung, tahun 2016 lulus dari SMP Negeri 28 Bandung, dan tahun 2019 lulus dari SMA Pasundan 1 Bandung.

PANCASILA

KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

PERSATUAN INDONESIA

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAK-SANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Rekonstruksi Partai Politik

Dalam Sistem Politik Indonesia

ISBN 978-623-88160-3-3 (PDF)
9 786238 816033